

LAPORAN AKHIR KAJIAN INDEKS DAYA SAING DAERAH KOTA SURAKARTA

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN:

PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

SUB KEGIATAN:

**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif**

PEKERJAAN:

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya, penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum sempurna sehingga masukan berupa saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Hasil dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 yang telah dilakukan bukan merupakan angka mutlak dalam mengukur keberhasilan daya saing Kota Surakarta. Namun demikian, angka ini dapat memberikan gambaran atas keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Surakarta, berdasarkan aspek, pilar, dimensi dan indikator daya saing regional. Semoga Laporan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Agustus 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta

AGUNG RIYADI, S.Sos., S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721 107 199303 1004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup Pekerjaan	6
BAB II KONSEP DAN PENDEKATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERWILAYAHAN SUBOSUKAWONOSRATEN.....	7
A. Konsep Pengembangan Daya Saing	7
B. Konsep Pilar Daya Saing dan Tahapan Capaian Pembangunan.....	8
C. Konsep Pengembangan Wilayah	10
D. Rumusan Konsep Daya Saing pada Sistem Perwilyahan	12
E. Pendekatan Kajian	14
F. Kebijakan Pemerintah Surakarta yang Tertuang dalam RPJMD	17
BAB III METODOLOGI.....	20
A. Desain Penelitian	20
B. Populasi dan Sampel.....	20
C. Alat Analisis	20
BAB IV ANALISIS GAMBARAN UMUM DAYA SAING KOTA SURAKARTA... 22	22
A. Gambaran Umum Kota Surakarta	22
B. Profil Umum IDSD Kota Surakarta versi BRIN	33
C. Analisis Pemetaan Daya Saing Kota Surakarta.....	37
D. Analisis Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta berdasarkan Skor Daya Saing ..	45
E. Analisis Peran Surakarta dalam Kebijakan Pembangunan Subosukawonosraten....	49
F. Analisis Pendalaman Isu Daya Saing Daerah dan Konteks Kebijakan Pembangunan Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten.....	52
BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN	53
A. Rekomendasi	53
BAB V REKOMENDASI PEMANFAATAN IDSD UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA.....	58
A. Kerangka Konsep Rekomendasi Pemanfaatan IDSD untuk Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta	58
B. Tahapan Proses Pemanfaatan	59
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN INDIKATOR PEMETAAN DAYA SAING DAERAH	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Perkembangan Skor Daya Saing Kota Surakarta	3
Gambar 2. 1 Tahap Pembangunan Daerah (World Economic Forum, 2008).....	9
Gambar 2. 2 Teori Kutub Pertumbuhan (Rauhut & Humer, 2020)	11
Gambar 2. 3 Konsep Pemanfaatan Indeks Daya Saing Pada Sistem Perwilayahan ..	13
Gambar 2. 4 Sasaran Penyusunan Kajian IDSD	16
Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta.....	23
Gambar 3. 2 Skor Daya Saing Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah versi BRIN	34
Gambar 3. 3 Aspek Daya Saing Kota Surakarta Veri BRIN	36
Gambar 3. 4 Daya Saing Surakarta berdasarkan Aspek	39
Gambar 3. 5 Daya Saing Surakarta berdasarkan Pilar	42
Gambar 3. 6 Daya Saing Surakarta berdasarkan Dimensi	45
Gambar 3. 7 Daya Saing Surakarta di Wilayah Subosukawonosraten	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Faktor, Pilar, dan Dimensi dalam Pengukuran IDSD	2
Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	24
Tabel 3. 2 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta (2011-2031).....	25
Tabel 3. 3 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (2019-2023).....	28
Tabel 3. 4 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (2019-2023).....	29
Tabel 3. 5 Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan usaha (2019-2023).....	30
Tabel 3. 7 Peran Kota Surakarta dalam Kutub Pertumbuhan Subosukawonosraten .	52
Tabel 4. 1 Skor Daya Saing Surakarta berdasarkan Dimensi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran daya saing daerah merupakan langkah esensial dalam mendukung optimalisasi kebijakan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2019 tentang "Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Sistem Perwilayahan di Jawa Tengah," Kota Surakarta yang merupakan bagian dari Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) menjadi salah satu pusat perhatian dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi. Subosukawonosraten, sebagai kawasan perwilayahan yang terintegrasi, membutuhkan daya saing yang kuat untuk meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nilai daya saing yang dimiliki Kota Surakarta selama ini telah menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas wilayah secara kolektif. Namun, meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut untuk menghadapi dinamika global dan nasional yang semakin kompleks.

Daya saing daerah, dalam konteks ini, tidak hanya mengacu pada kemampuan Kota Surakarta secara individual untuk bersaing, tetapi juga bagaimana kota ini mampu mendorong pertumbuhan di seluruh kawasan Subosukawonosraten. Pengukuran daya saing daerah menjadi kunci untuk memahami dan memetakan potensi serta kelemahan setiap daerah dalam sistem perwilayahan tersebut. Dengan data dan analisis yang tepat, kebijakan pembangunan dapat lebih diarahkan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, daya saing Kota Surakarta juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah, khususnya dalam menciptakan konvergensi ekonomi antara kota dan kabupaten di kawasan ini. Oleh karena itu, nilai daya saing tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi juga dasar untuk perumusan kebijakan strategis yang lebih efektif dan inklusif.

Secara teoritis, daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya. Camagni (2017) menyebutkan bahwa modal teritorial (territorial capital) yang terdiri dari aset-aset ekonomi, sosial, budaya, dan alamiah merupakan elemen kunci yang membentuk daya saing dan produktivitas suatu daerah. Modal teritorial ini berperan penting

dalam menentukan sejauh mana suatu wilayah mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, Kota Surakarta memiliki potensi besar dalam hal modal teritorial, yang tidak hanya didukung oleh sektor ekonomi tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, potensi ini perlu dikelola dan dikembangkan melalui kebijakan yang berbasis pada pengukuran daya saing yang komprehensif.

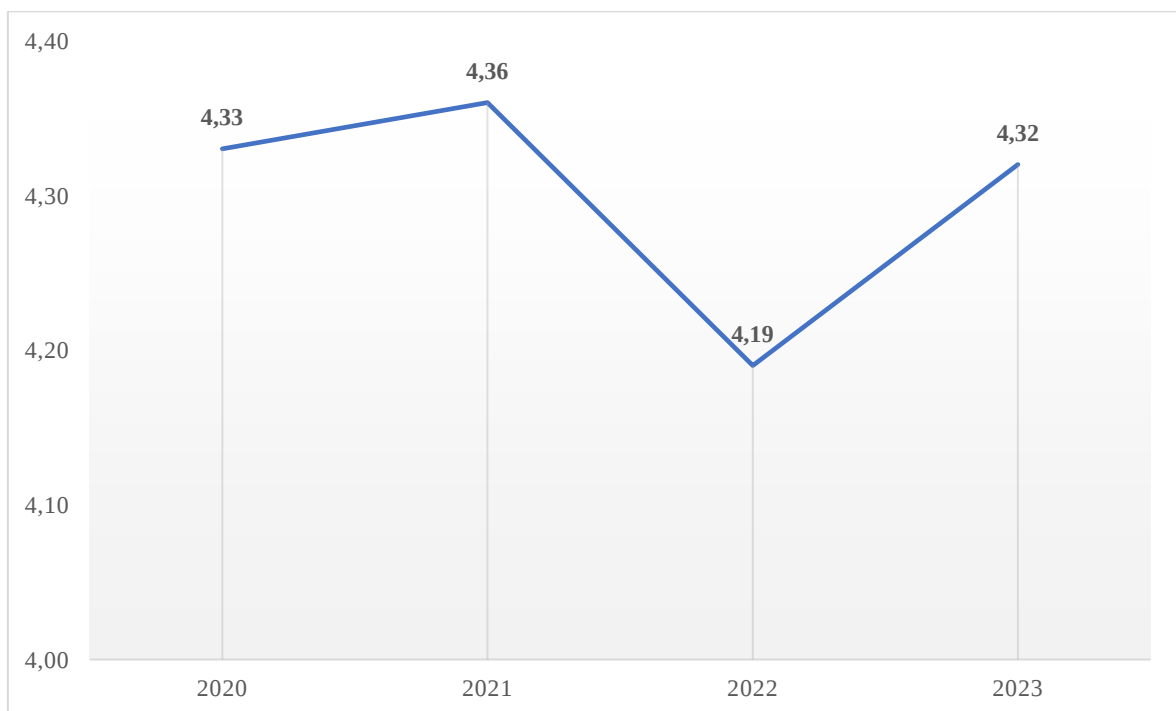
Pengukuran daya saing daerah di Indonesia, termasuk Kota Surakarta, menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur 4 faktor utama, yaitu kondisi institusi, infrastruktur, adopsi teknologi, dan lingkungan makroekonomi. Faktor-faktor ini kemudian dipecah menjadi 12 pilar, 23 dimensi, dan 96 indikator yang mencakup berbagai aspek dari ekonomi daerah. Dalam konteks Kota Surakarta, pengukuran ini memberikan panduan yang jelas tentang area mana yang perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan. *World Economic Forum* (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan kuantitatif dalam pengukuran daya saing untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 1. 1 Faktor, Pilar, dan Dimensi dalam Pengukuran IDSD

FAKTOR	PILAR	DIMENSI
1. Faktor Penguat/ Enabling Environment	1. Kelembagaan	1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Keamanan dan Ketertiban
	2. Infrastruktur	3. Infrastruktur Transportasi 4. Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan
	3. Perekonomian Daerah	5. Keuangan Daerah 6. Stabilitas Ekonomi
2. Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital	1. Kesehatan	7. Kesehatan
	2. Pendidikan & Keterampilan	8. Pendidikan 9. Keterampilan
3. Aspek Pasar/ Market	1. Efisiensi Pasar Produk	10. Kompetensi Dalam Negeri 11. Pajak dan Retribusi 12. Stabilitas Pasar
	2. Ketenagakerjaan	13. Ketenagakerjaan 14. Kapasitas Tenaga Kerja
	3. Akses Keuangan	15. Akses Keuangan
	4. Ukuran Pasar	16. Ukuran Pasar
4. Aspek Ekosistem Inovasi	1. Kesiapan Teknologi	17. Telematika 18. Teknologi
	2. Dinamika Bisnis	19. Regulasi 20. Kewirausahaan
	3. Kapasitas Inovasi	21. Interaksi & Keberagaman 22. Penelitian & Pengembangan 23. Komersialisasi
4 ASPEK	12 PILAR	23 DIMENSI

Sumber: Buku Panduan Pengukuran IDSD 2018-2020, BRIN

Mengadopsi pendekatan BRIN, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) menjadikan pengukuran daya saing daerah sebagai salah satu acuan utama untuk pembangunan kota berkelanjutan. Pengukuran ini tidak hanya untuk menilai posisi kompetitif kota ini di tingkat nasional, tetapi juga untuk memahami bagaimana dinamika regional dan global mempengaruhi kemampuan Surakarta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak lima tahun terakhir, Surakarta telah menunjukkan peningkatan skor daya saing yang signifikan. Pada tahun 2019, skor daya saing Surakarta mencapai 7,71/12, menjadikannya kota paling kompetitif kelima secara nasional. Pada tahun 2020 dan 2021, skor daya saing masing-masing adalah 4,33/5,00 dan 4,36/5,00, menempatkan Surakarta sebagai kota paling berdaya saing. Pada tahun 2022, skor ini sedikit menurun menjadi 4,19/5,00 kemudian menjadi 4,08/5,00 pada tahun 2023, merupakan skor tertinggi diantara kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, berdasarkan hasil analisis pemetaan daya saing berdasarkan data dukung yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Solo Data Kota Surakarta, skor daya saing Kota Surakarta pada tahun 2023 adalah 4,329/5,00



Gambar 1. 1 Tren Perkembangan Skor Daya Saing Kota Surakarta

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kota Surakarta adalah bagaimana memastikan daya saingnya tetap kuat di tengah perubahan global yang cepat. Dalam lima

tahun terakhir, meskipun skor daya saing Kota Surakarta relatif stabil, penurunan kecil pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan tersebut antara lain adalah urbanisasi yang cepat, kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Nogueira dan Madaleno (2021) dalam studi mereka menekankan bahwa kota-kota yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi Kota Surakarta untuk terus berinovasi dalam kebijakan dan strategi pembangunannya, dengan fokus pada penerapan teknologi hijau dan solusi inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap berbagai perubahan.

Dalam konteks sistem perwilayahan Subosukawonosraten, Kota Surakarta juga perlu memperkuat kolaborasi dengan daerah sekitarnya, seperti Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Penguatan kerjasama antar wilayah ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing masing-masing daerah, tetapi juga menciptakan sinergi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Chrobocinska (2021) menyatakan bahwa konvergensi daya saing antar wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengukuran daya saing di tingkat kota dan kabupaten dalam kawasan Subosukawonosraten perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Brida telah menetapkan pengukuran daya saing daerah sebagai salah satu acuan utama dalam perencanaan pembangunan kota. Dengan pendekatan ini, pemerintah kota dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan nasional, serta lebih proaktif dalam mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi. Selain itu, pengukuran ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Kota Surakarta dapat meningkatkan posisinya di tingkat nasional dan global, serta memperkuat daya saing kawasan Subosukawonosraten secara keseluruhan.

Pengukuran daya saing Kota Surakarta pada tahun 2024 akan difokuskan pada pendekatan yang lebih holistik, di mana setiap kota dan kabupaten dalam satu wilayah tidak hanya diukur berdasarkan kinerja individu, tetapi juga bagaimana mereka dapat saling menopang melalui keunggulan yang dimiliki di berbagai aspek. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara wilayah-wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang masih tertinggal dalam beberapa sektor, sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Misalnya, sebuah kota yang unggul dalam sektor pariwisata dapat bekerja sama dengan kota atau kabupaten tetangga yang memiliki potensi tetapi belum dimaksimalkan, sehingga

keduanya dapat berkembang secara bersama-sama. Pendekatan ini juga didukung oleh pandangan dari Camagni (2017) dan Foray (2000), yang menekankan pentingnya modal teritorial dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Modal teritorial tidak hanya mencakup sumber daya fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aset tidak berwujud seperti pengetahuan lokal, budaya, dan jaringan sosial yang dapat mendukung pertumbuhan wilayah.

Sejalan dengan pandangan ini, pengukuran daya saing tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa kuat suatu wilayah dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong kerjasama dan integrasi antar wilayah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, di mana semua wilayah, baik yang maju maupun yang masih berkembang, dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bersama. Dengan demikian, daya saing diukur tidak hanya dalam konteks individualistik, tetapi juga dalam konteks regional yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan ekonomi, sosial, atau lingkungan.

Kajian pemetaan daya saing daerah Kota Surakarta untuk tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang posisi kompetitif kota ini dalam konteks nasional dan global. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif, serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat antar daerah dalam kawasan Subosukawonosraten. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada data yang akurat, Kota Surakarta dapat terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu kota paling berdaya saing di Indonesia, sekaligus menjadi model bagi kota-kota lain dalam hal adaptasi dan inovasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Kajian ini mempunyai maksud untuk menganalisis Daya Saing Daerah untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta dan Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten dan Jawa Tengah Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup dari Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 antara lain adalah:

1. Menganalisis Profil Daya Saing (Produktivitas) Kota Surakarta Tahun 2024;
2. Menganalisis Daya Saing Kota Surakarta tahun 2024 terhadap wilayah Subosukawonosraten;
3. Menganalisis Peran Kota Surakarta dalam Kebijakan Pembangunan Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten;
4. Menganalisis Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta berdasarkan Nilai Indeks Daya Saing Daerah.

BAB II

KONSEP DAN PENDEKATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM PERWILAYAHAN SUBOSUKAWONOSRATEN

A. Konsep Pengembangan Daya Saing

Daya saing suatu daerah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, berkaitan erat dengan produktivitas dan perannya dalam mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Melalui pengukuran daya saing daerah (DSD), dapat diidentifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi setiap wilayah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, sembari tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Produktivitas wilayah yang tinggi akan memperkuat sistem ekonomi nasional secara berkelanjutan, sementara tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah perlu diatasi agar kontribusi ini dapat optimal dan tidak menghambat pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan daya saing di tingkat lokal menjadi elemen penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan strategi pembangunan regional dan global yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama.

Keberlanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam lingkup strategi, rencana pembangunan, dan dokumen-dokumen normatif lainnya di berbagai negara yang kemudian kebanyakan diadaptasikan pada skala regional termasuk kota atau kabupaten (Chrobocinska, 2021). Konsep keberlanjutan tersebut kemudian memiliki keterkaitan dengan daya saing. Peningkatan daya saing suatu kota dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan bagi regional provinsi maupun negara, walaupun daya saing sebuah provinsi dan negara tidak serta merta dicapai melalui tingkat pembangunan yang sama persis antar masing-masing daerah. Oleh karena itu, menjadi tugas yang sangat penting untuk memperhatikan disparitas antar wilayah, sekaligus menjadikan masing-masing wilayah menjadi tempat tinggal dan lahan menarik bagi investor dengan menonjolkan keunggulan masing-masing wilayah serta mempertimbangkan faktor penghambat perkembangan suatu wilayah tertentu. Identifikasi keunggulan dan faktor penghambat inilah yang menjadi tolok ukur kemampuan bersaing suatu daerah (Judrupa, 2021). Dengan demikian secara esensial daya saing bukan hanya masalah ekonomi makro, melainkan kemampuan bersaing di tingkat regional, perkotaan dan lingkup yang lebih lokal lagi (Parjaman dkk., 2019).

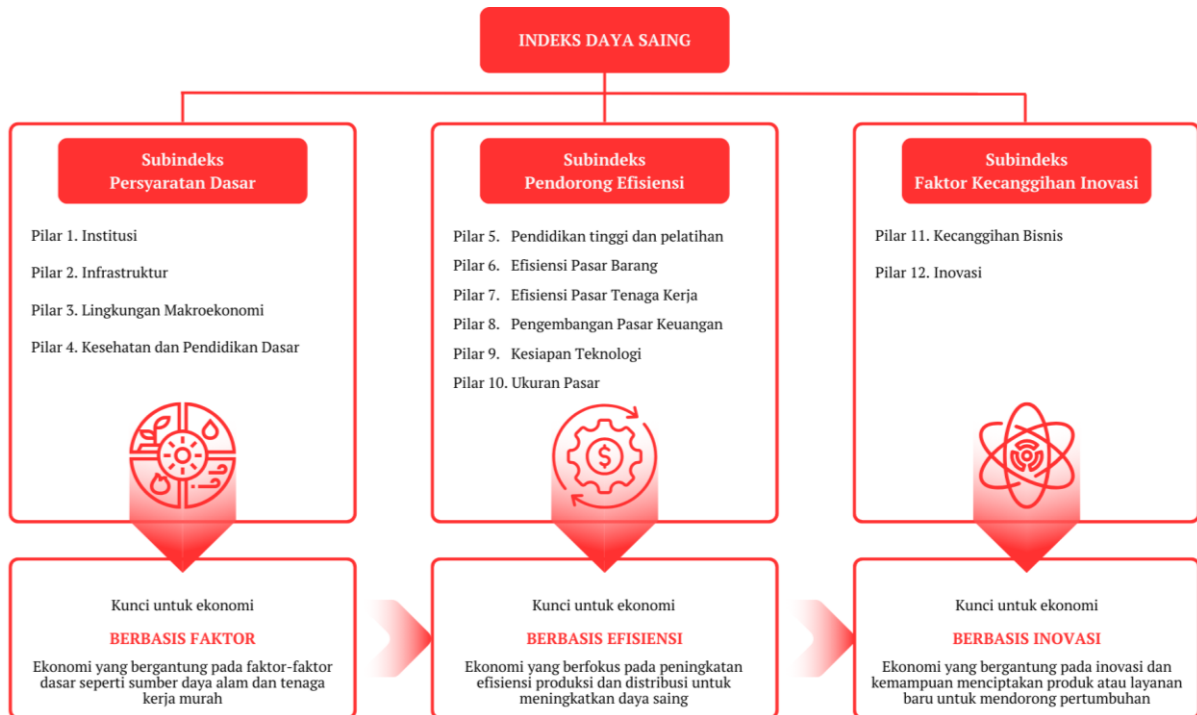
Ketels (2016) membedakan definisi daya saing antara yang berpusat pada biaya dan yang berpusat pada produktivitas. Daya saing yang berpusat pada biaya tergantung pada

biaya produksi unit di tempat tertentu; biaya produksi per unit yang rendah memungkinkan daerah untuk bersaing di pasar global. Sebaliknya, daya saing produktivitas bergantung pada kapasitas suatu tempat untuk menambah nilai berdasarkan faktor produksi, dengan kata lain seberapa produktif tempat itu. Faktor produktif, seperti tenaga kerja dan modal, berpindah antar daerah dan terjadi transmisi dan sinergi antar daerah, sehingga struktur ekonomi daerah berbeda dengan struktur ekonomi nasional. Dengan kata lain, wilayah tidak sesuai dengan versi ekonomi nasional yang lebih kecil, karena mereka berbeda secara struktural.

Definisi daya saing dalam perspektif modern, secara implisit dapat dilihat melalui kacamata “daya saing perusahaan”. Dengan demikian “daya saing negara” atau “daya saing daerah” terdapat korelasi bahwa di sana ada hubungan antara konsep kinerja perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan konsep bahwa kapasitas suatu negara atau daerah dapat menghasilkan kesejahteraan bagi penduduknya (Catalan, 2021). Sementara itu, *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing negara atau daerah sebagai “seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara atau daerah” dan mengakui bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Schwab, 2017). Bagi *IMD World Competitiveness Center*, daya saing negara atau daerah didefinisikan sebagai “kemampuan suatu bangsa atau region untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menopang penciptaan nilai lebih bagi perusahaannya dan lebih banyak kemakmuran bagi rakyatnya” (IMD, 2018).

B. Konsep Pilar Daya Saing dan Tahapan Capaian Pembangunan

Dalam konteks daya saing dan pembangunan, pendekatan Tahapan Pembangunan yang diperkenalkan oleh World Economic Forum (WEF) sangat relevan. Tahapan ini terdiri dari Factor Driven, Efficiency Driven, dan Innovation Driven, yang mencerminkan tahapan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Pada tahap Factor Driven, ekonomi didominasi oleh faktor-faktor dasar seperti sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Wilayah pada tahap ini berfokus pada produksi berbasis faktor-faktor ini untuk bersaing di pasar global. Ketika wilayah tersebut mulai berkembang, ia beralih ke tahap Efficiency Driven, di mana efisiensi dalam produksi dan distribusi menjadi penentu utama daya saing. Pada tahap ini, pentingnya teknologi menengah dan keterampilan tenaga kerja semakin meningkat, memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi. Tahap terakhir adalah Innovation Driven, di mana daya saing wilayah didorong oleh inovasi dan kemampuan menciptakan produk serta layanan yang unik dan bernilai tinggi.



Gambar 2. 1 Tahap Pembangunan Daerah (World Economic Forum, 2008)

Porter (2003) mengakui bahwa banyak penelitian tentang daya saing telah difokuskan pada skala nasional, tanpa mengakui perbedaan internal antar wilayah, yang ada di semua negara. Ia mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan kinerja ekonomi adalah komponen regional, seperti input khusus, infrastruktur, pendidikan angkatan kerja, institusi yang akan mendorong aglomerasi perusahaan dalam bentuk klaster.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta atau perusahaan.
2. Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir

meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

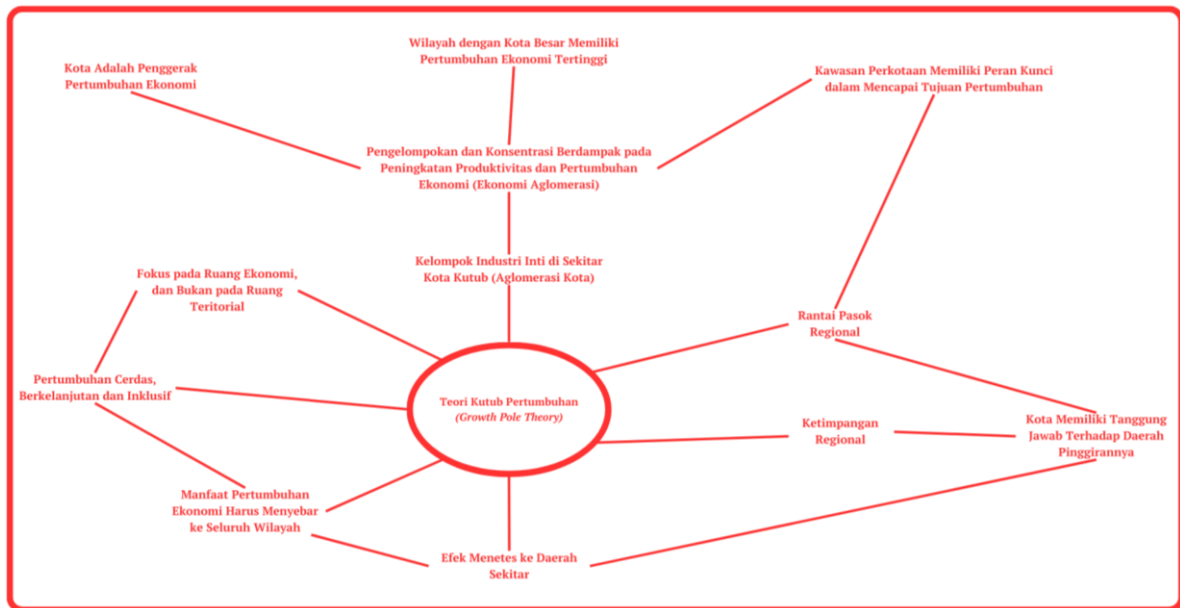
3. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi.” Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan Bank Indonesia (PPSK-BI) mendefenisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah dkk, 2002).

C. Konsep Pengembangan Wilayah

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, interaksi antara wilayah-wilayah, baik lokal maupun regional, memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Teori *Regional Networks/Cluster Interdependency Model* yang dikemukakan oleh Douglas (1998) menekankan bahwa hubungan antara desa dan kota adalah suatu keterkaitan yang kompleks dan saling mendukung sesuai dengan bidang kegiatannya. Keterkaitan ini tidak hanya melibatkan aliran sumber daya atau tenaga kerja, tetapi juga mencakup interaksi yang lebih mendalam berdasarkan spesialisasi dan peran kontekstual masing-masing wilayah. Desa dapat berfungsi sebagai pemasok bahan baku untuk kegiatan industri atau pertanian di kota, sementara kota dapat menjadi pusat inovasi dan distribusi yang mendukung pengembangan ekonomi di desa-desa sekitarnya. Sinergi ini menciptakan jaringan regional yang memperkuat daya saing keseluruhan, di mana setiap wilayah saling melengkapi dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya.

Konsep modal teritorial (*Territorial Capital*) sangat relevan dalam memahami dinamika pengembangan wilayah. Menurut Camagni (2017), Foray (2000), dan Storper (2003), modal teritorial mencakup aset ekonomi, sosial, budaya, dan alamiah yang dimiliki oleh suatu daerah, yang menjadi dasar bagi daya saing serta pembangunan wilayah tersebut. Aset-aset ini, baik berupa sumber daya alam, warisan budaya, jaringan sosial, maupun

infrastruktur, memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik unik suatu daerah, yang memungkinkan terciptanya keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pembangunan wilayah tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana semua aset teritorial dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2. 2 Teori Kutub Pertumbuhan (Rauhut & Humer, 2020)

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi sejauh mana interaksi dan keterkaitan antarwilayah terjadi. IDSD membantu mengevaluasi bagaimana suatu daerah berinteraksi dengan daerah lain, terutama dalam konteks sinergi ekonomi dan pembangunan. Sebagai contoh, sebuah kota dengan daya saing tinggi di sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Investasi yang mengalir ke kota tersebut tidak hanya akan berakhir di wilayah kota, tetapi juga berdampak positif pada desa-desa di sekitarnya, seperti melalui peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata lokal atau melalui permintaan terhadap produk-produk lokal. Hubungan timbal balik ini menggambarkan pentingnya model interdependensi regional, di mana setiap wilayah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan kompleks yang saling bergantung.

Sebaliknya, wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi hambatan signifikan bagi peningkatan daya saing regional. Sebagai contoh, sebuah daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian tetapi mengalami keterbatasan akses

transportasi mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya ke pasar yang lebih luas, sehingga mengurangi daya saingnya. Dalam konteks ini, pengukuran IDSD membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Porter (2003) yang menekankan pentingnya pengembangan indikator global untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran guna meningkatkan daya saing.

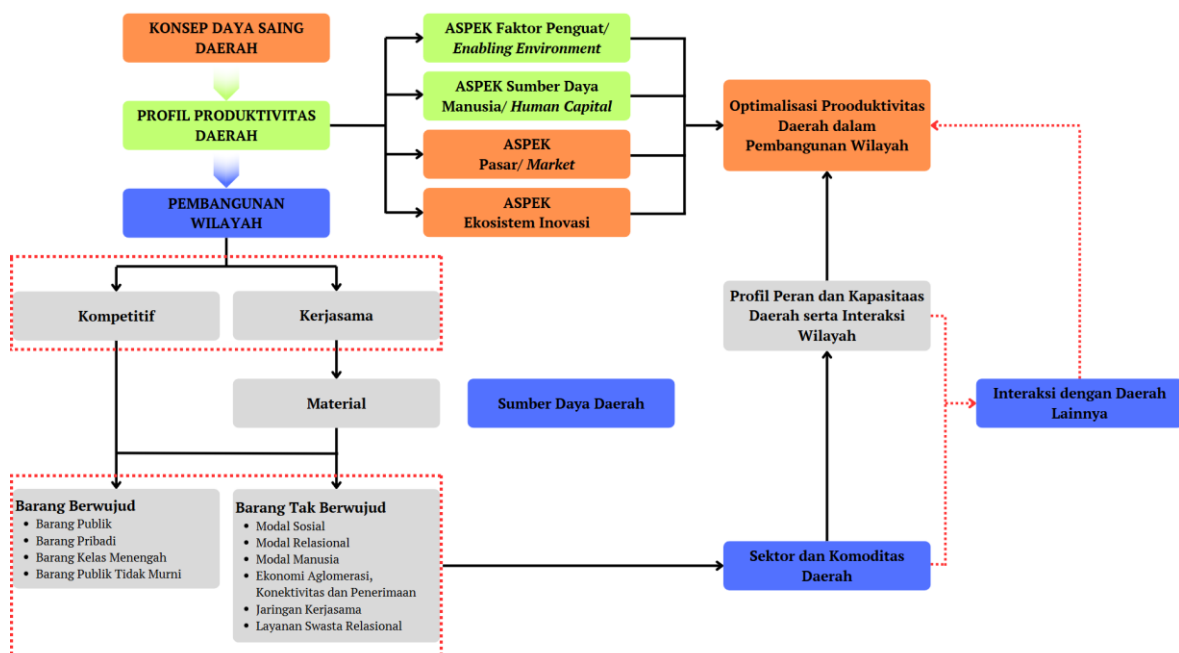
Modal teritorial juga relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi. Aset-aset alamiah, misalnya, dapat menjadi modal yang berharga dalam merespons tantangan perubahan iklim melalui pengembangan infrastruktur hijau dan teknologi berkelanjutan. Kota-kota yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global ini cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota yang lamban dalam mengadopsi teknologi hijau atau solusi inovatif. Hal ini dikemukakan oleh Noguiera dan Madaleno (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan untuk merespons cepat terhadap perubahan global menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing suatu daerah di era globalisasi. Oleh karena itu, pengukuran IDSD yang dinamis dan responsif terhadap perubahan global sangat penting untuk memastikan bahwa daerah tersebut tetap kompetitif di masa depan.

D. Rumusan Konsep Daya Saing pada Sistem Perwilyahan

Lebih lanjut, pengukuran IDSD juga memiliki relevansi yang kuat dengan pengambilan kebijakan berbasis data. Data yang akurat dan terkini merupakan elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam menentukan sektor-sektor prioritas yang perlu dikembangkan. Misalnya, data daya saing yang dihasilkan melalui pengukuran IDSD dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut, seperti sektor pertanian di daerah pedesaan atau sektor industri kreatif di daerah perkotaan. Dengan menggunakan data ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya, sehingga setiap wilayah dapat memaksimalkan potensi teritorialnya. Selain itu, kebijakan berbasis data juga dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh suatu daerah, seperti kekurangan infrastruktur, kesenjangan pendidikan, atau kurangnya akses terhadap teknologi.

Di sisi lain, IDSD juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing daerah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, peningkatan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih kompetitif, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, konsep pengukuran IDSD berfungsi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada beberapa daerah tertentu, tetapi juga tersebar merata di seluruh wilayah. Konsep konvergensi daya saing ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui identifikasi daerah-daerah yang tertinggal dan pemberian dukungan yang sesuai, seperti investasi dalam infrastruktur atau pelatihan bagi tenaga kerja, daerah-daerah tersebut dapat diberdayakan untuk meningkatkan daya saing mereka. Pendekatan yang inklusif ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan lingkungan.



Gambar 2. 3 Konsep Pemanfaatan Indeks Daya Saing Pada Sistem Perwilayahan

E. Pendekatan Kajian

Dalam penelitian ini, pendekatan kajian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode analisis campuran, atau yang dikenal sebagai *mixed methods research*. Metode ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang dikaji. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik yang bersifat objektif, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran secara lebih mendalam. Menurut Creswell & Clark (2011), metode campuran mampu menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan ini, sehingga memberikan hasil yang lebih valid dan relevan dalam studi kebijakan dan pengukuran daya saing. Dalam konteks ini, desain penelitian kuantitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan profil daya saing daerah Kota Surakarta melalui pengukuran yang terstruktur dan rinci.

Populasi yang menjadi fokus kajian terdiri dari instansi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik yang memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan kajian. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa metode *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan, sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat dan relevan terhadap fokus kajian. Dalam konteks ini, pemilihan sampel ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Surakarta, termasuk yang terlibat dalam pengukuran daya saing daerah.

Sasaran kajian ini dibagi menjadi **empat tahap utama**. **Sasaran pertama** berfokus pada analisis profil daya saing daerah Kota Surakarta, terutama dalam aspek produktivitas. Pada tahap ini, telah dilakukan analisis terhadap data Indeks Daya Saing Daerah yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan daya saing Kota Surakarta dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang posisi daya saing Kota Surakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hasil analisis tersebut akan menjadi landasan

dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sasaran kedua adalah menganalisis peran Kota Surakarta dalam kebijakan pembangunan sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Sistem perwilayahan ini mencakup kerjasama antarwilayah dalam lingkup Subosukawonosraten, yang meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Analisis ini telah dilakukan untuk memahami bagaimana peran Kota Surakarta dalam konteks kerjasama regional dapat mempengaruhi daya saing daerah. Namun, kajian ini belum sepenuhnya lengkap, karena masih diperlukan kuesioner dan forum diskusi kelompok (FGD) untuk menggali lebih dalam tentang interaksi kewilayahan di kawasan ini. Melalui metode kualitatif ini, peneliti akan mendapatkan wawasan dari para pemangku kepentingan tentang dinamika interaksi antarwilayah serta bagaimana kerjasama tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing regional.

Sasaran ketiga adalah menganalisis prioritas isu daya saing daerah Kota Surakarta dan konteks kebijakan pembangunan sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Analisis ini telah dilakukan melalui evaluasi data dan wawancara mendalam dengan para ahli dan pelaku kebijakan di bidang pembangunan daerah. Namun, masih diperlukan FGD untuk lebih memperdalam analisis tentang program prioritas dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan daya saing daerah. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling mendesak dan relevan bagi peningkatan daya saing Kota Surakarta serta wilayah Subosukawonosraten secara keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan wawancara tambahan untuk mengonfirmasi hasil FGD dan memperoleh data yang lebih rinci mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan yang ada.

Sasaran keempat berfokus pada analisis rekomendasi kebijakan pembangunan sistem perwilayahan Subosukawonosraten berdasarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah. Kajian ini telah dilakukan dengan mengevaluasi data IDSD serta menelaah berbagai kebijakan yang telah diterapkan di wilayah ini. Namun, tahap akhir dari kajian ini belum selesai, karena masih diperlukan FGD untuk membahas kebijakan dan program pengembangan yang dapat mendukung peningkatan daya saing wilayah melalui pemanfaatan IDSD. FGD ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Subosukawonosraten.



Gambar 2. 4 Sasaran Penyusunan Kajian IDSD

Luaran dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing wilayah. Profil IDSD Pengukuran 2023 akan menjadi salah satu keluaran utama dari penelitian ini. Profil ini tidak hanya akan memberikan gambaran komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan daya saing Kota Surakarta, tetapi juga akan mengidentifikasi potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, analisis keterkaitan kontekstual peran dan kapasitas daerah akan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana Kota Surakarta dapat memaksimalkan peranannya dalam sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Kajian ini juga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis sistem perwilayahan yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan metode analisis campuran, penelitian ini akan memberikan data yang akurat dan analisis yang mendalam tentang berbagai aspek daya saing Kota Surakarta. Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui pengukuran IDSD akan dilengkapi dengan wawasan kualitatif yang diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya angka dan data statistik, tetapi juga faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi daya saing daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kajian ini juga memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan daerah di era globalisasi. Pengukuran daya saing daerah tidak hanya penting untuk menilai posisi Kota Surakarta di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks regional dan global. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan perkembangan teknologi, kemampuan suatu daerah untuk beradaptasi dan bersaing di

tingkat internasional menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi Kota Surakarta, tetapi juga bagi kawasan Subosukawonosraten dalam upaya bersama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini.

F. Kebijakan Pemerintah Surakarta yang Tertuang dalam RPJMD

Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta menjadikan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai pegangan utama. Adapun kebijakan terkait dengan isu strategis pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan adalah:

- 1) Pemetaan sumber daya aparatur berbasis sistem merit;
- 2) Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat;
- 4) Optimalisasi layanan fungsi DPRD;
- 5) Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektornik;
- 6) Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Penguatan kerja sama regiona, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan kelompok masyarakat;
- 8) Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik;
- 9) Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan inovasi daerah;
- 10) Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi.

2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter, unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan

kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- 3) Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing;
- 4) Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja;
- 5) Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak;
- 6) Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 7) Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan;
- 8) Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya.

3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/cyber berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City;

- 2) Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City;
- 3) Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor;
- 4) Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan;
- 5) Peningkatan daya tarik investasi;
- 6) Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi;
- 7) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya;
- 2) Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;
- 3) Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat;
- 4) Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim.

5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

- 1) Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana.

BAB III

METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan metode survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Desain penelitian survei yang dipergunakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penerapan teknologi dalam praktek bisnis di Kota Surakarta.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas dan lembaga, serta stakeholder yang relevan dengan pengukuran indeks daya saing daerah di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.

C. Alat Analisis

Kajian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiono (2005:142).

2. Analisis Indeks Daya Saing Daerah

Mengukur tingkat daya saing daerah berdasarkan komponen daya saing daerah tahun 2023 diukur dengan 4 Aspek, 12 Pilar. Dari keempat aspek dan duabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula.

3. Analisis Tahapan Pembangunan dan Daya Saing (*Stages of Development and Competitiveness*)

Klasifikasi berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi didasarkan pada tahapan yang ditetapkan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang meliputi:

1) *Factor-driven Economy*

Ekonomi yang digerakkan oleh faktor adalah yang paling tidak berkembang. Mereka didominasi oleh pertanian subsisten dan bisnis ekstraksi, dengan sangat bergantung pada tenaga kerja (tidak terampil) dan sumber daya alam;

2) *Efficiency-driven Economy*

Perekonomian yang digerakkan oleh efisiensi semakin kompetitif, dengan proses produksi yang lebih efisien dan peningkatan kualitas produk;

3) *Innovation-driven Economy*

Ekonomi yang digerakkan oleh inovasi adalah yang paling berkembang. Pada fase ini, bisnis lebih padat pengetahuan, dan sektor jasa berkembang.

4. Analisis Kewilayahan

Dalam penyusunan kajian pemetaan daya saing daerah, akan digunakan alat analisis berupa tinjauan daya saing wilayah sekitar Kota Surakarta yang meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan daya saing Kota Surakarta dengan wilayah-wilayah sekitarnya, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing wilayah, serta mengeksplorasi potensi kolaborasi untuk meningkatkan daya saing regional. Tinjauan ini akan mencakup berbagai indikator, seperti infrastruktur, aksesibilitas, tingkat inovasi, sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik.

Dengan membandingkan data ini, kajian ini dapat melihat di mana Kota Surakarta unggul dan di mana perlu adanya peningkatan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, Kabupaten Boyolali mungkin unggul dalam sektor pertanian dan peternakan, sementara Sukoharjo dan Karanganyar lebih maju dalam industrialisasi. Wonogiri memiliki potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan ke seluruh daerah. Selain mengidentifikasi keunggulan, analisis ini juga akan mengungkap kelemahan di masing-masing wilayah. Misalnya, jika Sragen mengalami masalah aksesibilitas transportasi, maka perbaikan infrastruktur dapat direncanakan sebagai bagian dari strategi kolaboratif. Dengan demikian, kelemahan satu wilayah dapat diatasi melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB IV

ANALISIS GAMBARAN UMUM DAYA SAING KOTA SURAKARTA

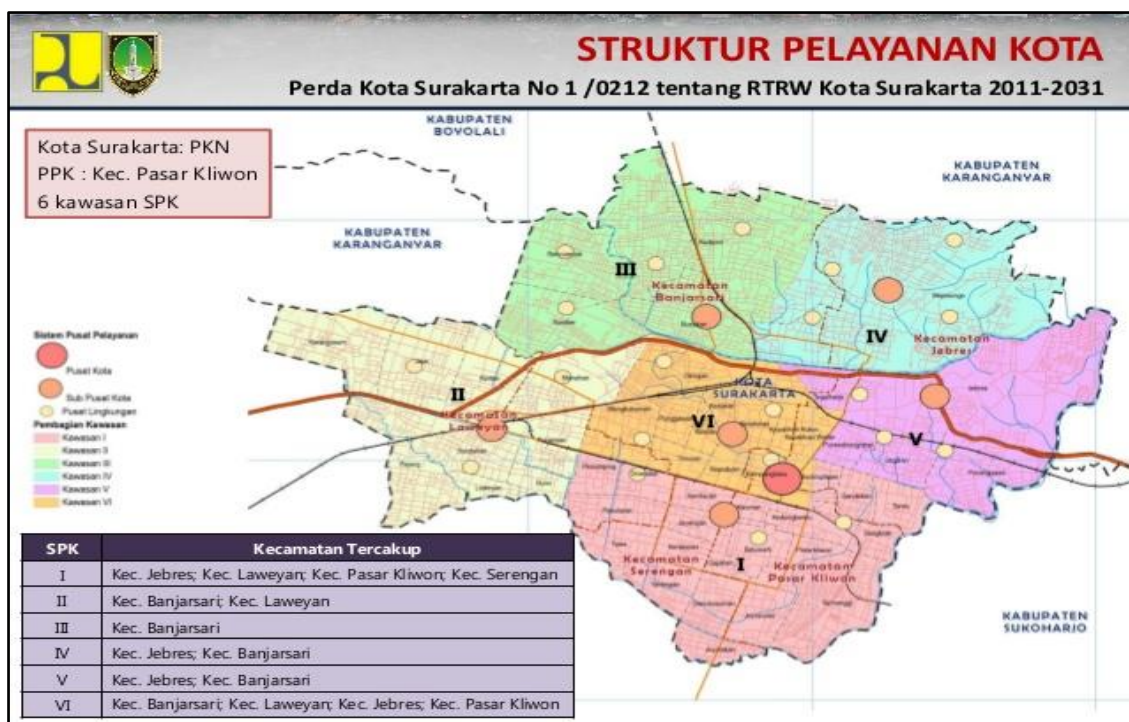
A. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki tanah yang subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta melalui Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Dari sudut pandang geografis, Kota Surakarta memiliki posisi strategis karena dilintasi oleh dua jalur utama yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Wilayah kota ini terbagi menjadi lima kecamatan dan 54 kelurahan.

Kota Surakarta memiliki tiga simbol identitas utama: Keraton, Batik, dan Pasar Klewer. Simbol-simbol ini menjadi nilai jual utama kota, tercermin dalam bangunan-bangunan kuno, tradisi yang terpelihara, budaya, dan karya seni. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat kota ini tidak lepas dari pengaruh budaya dan spasial keraton. Tradisi membatik, yang diwariskan turun-temurun, juga berkontribusi pada reputasi daerah ini. Sektor pariwisata dan perdagangan di Kota Surakarta saling terkait dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Profil Geografis Wilayah

Kota Surakarta, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kota madya di bawah administrasi provinsi tersebut. Secara geografis, Kota Surakarta berada pada koordinat 110° 45' 15" hingga 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' hingga 7° 56' Lintang Selatan. Kota ini terletak di dataran rendah dengan elevasi sekitar 105 meter di atas permukaan laut (dpi) di pusat kota dan 95 meter dpi di pusat kota itu sendiri. Dengan luas wilayah sebesar 44,1 km², Kota Surakarta mencakup 0,14% dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak sekitar 65 km timur laut dari Yogyakarta dan 100 km tenggara dari Semarang, dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi di bagian barat, serta Gunung Lawu di bagian timur. Juga terdapat Pegunungan Sewu yang membentang lebih jauh di selatan.



Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta
(Sumber: Setda Kota Surakarta, 2023)

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Kota Surakarta memainkan peran penting dalam mendukung kota-kota lain seperti Semarang dan Yogyakarta, serta kabupaten-kabupaten di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas administrasi Kota Surakarta, sebagaimana diatur dalam RT/RW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
2. Batas Selatan: Kabupaten Sukoharjo
3. Batas Timur: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
4. Batas Barat: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Pembentukan RT/RW di Kota Surakarta mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
1.	Laweyan	11	9,13	105	458
2.	Serengan	7	3,08	72	313
3.	Pasar Kliwon	10	4,88	101	437
4.	Jebres	11	14,38	153	651
5.	Banjarsari	15	15,26	195	930
Kota Surakarta		54	46,73	626	2.789

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW, dan 2.789 RT pada tahun 2021, dengan jumlah yang tetap pada tahun 2023. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 15,26 km², sedangkan Kecamatan Serengan memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 3,08 km². Kecamatan Banjarsari juga memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 15 kelurahan, sementara Kecamatan Serengan memiliki jumlah kelurahan paling sedikit, yaitu 7 kelurahan. Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah RW terbanyak, yaitu 195 RW dengan 930 RT, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah RW dan RT paling sedikit, yaitu 72 RW dan 313 RT.

2. Kondisi Rencana Struktur Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta merupakan panduan strategis dalam mengembangkan dan memanfaatkan wilayah untuk mencapai pertumbuhan kota yang berkelanjutan. RTRW ini tidak hanya mengatur penggunaan lahan tetapi juga mengarahkan fungsi setiap kawasan, sejalan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Surakarta membagi wilayahnya menjadi beberapa sub pusat pelayanan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meminimalkan kesenjangan antar kawasan di dalam kota.

Tabel 3. 2 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta (2011-2031)

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kewenangan
1	I	Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan	Pariwisata budaya, perdagangan dan jasa, olahraga dan industri kreatif
2	II	Laweyan dan Banjarsari	Pariwisata, olahraga dan industri kreatif
3	III	Banjarsari	Permukiman, perdagangan dan jasa
4	IV	Banjarsari dan Jebres	Permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industri ringan
5	V	Banjarsari dan Jebres	Pariwisata, pendidikan tinggi, industri kreatif
6	VI	Banjarsari, Jebres, dan Laweyan	Pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa

Sumber: JDIH Kota Surakarta (2023)

Sub Pusat Pelayanan Kota pertama mencakup Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, dan Laweyan. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi pusat pariwisata budaya, perdagangan dan jasa, olahraga, serta industri kreatif. Sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya, seperti Keraton Kasunanan dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya, kawasan ini memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata. Selain itu, keberadaan pusat perdagangan tradisional dan modern juga menjadi penggerak utama ekonomi kawasan ini. Pengembangan industri kreatif diharapkan dapat menambah dinamika ekonomi kawasan, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal yang berinovasi dan bernilai seni.

Sub Pusat Pelayanan Kota kedua mencakup Kecamatan Laweyan dan Banjarsari. Kawasan ini difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata, olahraga, dan industri kreatif. Kawasan Laweyan yang sudah terkenal sebagai pusat batik tradisional dan industri kreatif berbasis budaya dapat semakin berkembang dengan adanya peningkatan infrastruktur dan dukungan pemerintah. Banjarsari, sebagai kecamatan yang dinamis, memiliki potensi

besar dalam sektor olahraga melalui pengembangan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau yang mendukung gaya hidup sehat.

Selanjutnya, Sub Pusat Pelayanan Kota ketiga berfokus pada Kecamatan Banjarsari. Kawasan ini direncanakan menjadi pusat permukiman, perdagangan, dan jasa. Sebagai salah satu kecamatan terbesar di Surakarta, Banjarsari memiliki fungsi vital dalam menopang pertumbuhan penduduk. Pengembangan kawasan ini sebagai permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas perdagangan dan jasa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan akses ekonomi.

Sub Pusat Pelayanan Kota keempat meliputi Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Kawasan ini difokuskan pada pengembangan permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri kecil dan ringan. Pengembangan industri kecil dan ringan di kawasan ini bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi pada skala kecil yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, ketersediaan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas perdagangan dan jasa akan memudahkan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sub Pusat Pelayanan Kota kelima mencakup Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Fokus utama kawasan ini adalah pengembangan pariwisata, pendidikan tinggi, dan industri kreatif. Keberadaan institusi pendidikan tinggi yang semakin berkembang di kawasan ini memberikan peluang untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung industri kreatif. Pariwisata, yang merupakan sektor unggulan, diharapkan dapat memanfaatkan potensi budaya dan pendidikan tinggi sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sub Pusat Pelayanan Kota keenam mencakup Kecamatan Banjarsari, Jebres, dan Laweyan. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi pusat pemerintahan, pariwisata budaya, serta perdagangan dan jasa. Sebagai pusat pemerintahan, kawasan ini akan mendukung operasional administrasi pemerintahan yang lebih baik, sementara sektor pariwisata budaya akan memanfaatkan situs-situs bersejarah di wilayah ini. Keberadaan pusat perdagangan dan jasa juga akan memperkuat aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

3. Perkembangan Ekonomi Kota Surakarta (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang terukur tanpa pengaruh inflasi, dengan total yang meningkat dari Rp 35.441 miliar pada 2019 menjadi Rp 40.620 miliar pada 2023. Sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi terus menjadi penggerak utama ekonomi, dengan pertumbuhan yang stabil. Meski beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian mengalami penurunan signifikan, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pemulihan yang kuat setelah terdampak pandemi, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 2021 ke 2023. Pentingnya PDRB ADHK terletak pada kemampuannya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi riil, yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis data. Data ini membantu pemerintah daerah Kota Surakarta dalam menetapkan prioritas pembangunan, menyusun anggaran, serta mengukur efektivitas program ekonomi yang dijalankan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan nilai total yang meningkat dari Rp 47.999 miliar pada 2019 menjadi Rp 60.485 miliar pada 2023. Kategori seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, mencerminkan dominasi sektor-sektor tersebut dalam ekonomi lokal. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan digitalisasi dan peningkatan kebutuhan akan layanan teknologi. Urgensi PDRB ADHB terletak pada perannya sebagai indikator utama untuk menyusun statistik keuangan daerah, yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan ekonomi. Dengan menganalisis data PDRB, pemerintah Kota Surakarta dapat mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Tabel 3. 3 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (2019-2023)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.185,36	149.001,94	152.191,74	155.546,80	168.570,91
B	Pertambangan dan Penggalian	185,49	174,08	148,36	116,56	102,60
C	Industri Pengolahan	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01	2.915.401,41	2.999.105,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79.648,25	80.914,24	86.460,08	91.174,06	97.938,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.986,31	60.886,07	58.270,83	56.546,88	58.309,54
F	Konstruksi	9.088.768,34	8.909.743,46	8.971.026,38	9.067.626,56	9.192.899,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68	8.605.954,38	9.050.873,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57	924.542,36	976.390,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16	2.296.552,48	2.563.052,83
J	Informasi dan Komunikasi	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31	7.098.628,47	7.890.420,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51	1.261.340,69	1.267.905,79
L	Real Estate	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90	1.622.052,68	1.733.492,49
M, N	Jasa Perusahaan	280.665,53	256.718,39	262.333,82	280.145,88	299.749,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59	1.796.912,24	1.894.496,41
P	Jasa Pendidikan	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66	1.532.096,13	1.614.913,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379.101,04	425.010,18	430.202,70	446.538,85	473.463,40
R, S, T, U	Jasa Lainnya	356.884,83	305.778,92	305.981,96	324.811,93	338.628,91
PDRB-ADHK		35.441.107,67	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.988,36	40.620.314,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2024)

PDRB ADHK Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan peningkatan signifikan di sektor konstruksi, perdagangan, dan informasi serta komunikasi. Penurunan di sektor pertambangan dan penggalian serta volatilitas di transportasi menunjukkan tantangan yang perlu diatasi.

Tabel 3. 4 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (2019-2023)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	233.429,61	243.785,19	253.396,56	265.551,93	301.556,55
B	Pertambangan dan Penggalian	289,08	281,60	243,11	197,51	181,95
C	Industri Pengolahan	4.060.311,37	4.017.388,59	4.362.549,95	4.797.441,28	5.171.847,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94.467,61	95.469,58	104.634,85	111.245,26	122.099,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68.562,82	74.921,49	71.493,11	70.981,25	73.955,93
F	Konstruksi	13.008.931,29	12.878.839,68	13.423.876,09	14.517.922,66	15.201.260,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.635.516,54	10.306.413,83	11.062.420,64	12.183.473,14	13.325.377,29
H	Transportasi dan Pergudangan	1.241.375,56	491.167,78	524.376,11	1.294.670,82	1.494.771,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.596.798,29	2.167.235,46	2.379.346,01	3.486.610,06	3.935.053,89
J	Informasi dan Komunikasi	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25	7.671.537,07	8.548.550,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.805.302,07	1.856.884,85	1.968.240,07	2.144.788,21	2.222.459,67
L	Real Estate	1.846.239,69	1.890.733,35	1.974.896,20	2.147.885,58	2.337.917,52
M, N	Jasa Perusahaan	414.236,87	387.892,84	402.026,46	453.360,04	506.767,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99	2.692.897,04	2.904.934,74
P	Jasa Pendidikan	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83	2.889.390,40	3.118.921,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535.372,96	622.766,87	635.796,69	674.127,06	736.684,33
R, S, T, U	Jasa Lainnya	456.680,62	402.465,17	406.397,27	446.469,10	483.423,67
PDRB-ADHB		47.999.714,41	47.621.820,53	50.371.564,19	55.848.548,41	60.485.763,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2024)

Laju Implisit PDRB Kota Surakarta menunjukkan variasi dalam pertumbuhan sektor ekonomi antara 2019 dan 2023, dengan sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan laju tertinggi pada 9,32% pada 2023. Sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 7,00% pada 2022. Analisis ini penting untuk Laporan Statistik Keuangan Daerah, karena memberikan wawasan tentang kinerja sektoral dan membantu pemerintah dalam menilai efisiensi kebijakan ekonomi serta merencanakan intervensi strategis untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3. 5 Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan usaha (2019-2023)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,39	2,46	1,76	2,54	4,78
B	Pertambangan dan Penggalian	1,6	3,80	1,30	3,41	4,66
C	Industri Pengolahan	2,11	3,09	2,32	4,02	4,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,52	2,57	0,82	2,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,42	5,86	0,29	2,31	1,04
F	Konstruksi	3,11	0,99	3,52	7,00	3,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,75	2,20	1,50	5,29	4,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2,03	5,62	3,19	6,70	9,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	0,41	1,25	2,03	1,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,00	0,43	0,34	0,35	0,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	0,71	3,63	6,64	3,08
L	Real Estate	1,81	1,97	1,00	2,83	1,85
M, N	Jasa Perusahaan	1,55	2,38	1,43	5,60	4,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,51	1,14	0,45	2,37	2,32
P	Jasa Pendidikan	2,82	2,68	1,82	2,05	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	3,76	0,86	2,15	3,07
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,67	2,86	0,91	3,49	3,86
Produk Domestik Regional Bruto		2,14	0,99	1,70	4,35	2,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2024)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan laju implisit PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing Kota Surakarta. PDRB mencerminkan total output ekonomi dari berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan PDRB yang stabil menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan kemajuan dalam berbagai sektor, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing kota. Misalnya, sektor "Industri Pengolahan" dan "Transportasi dan Pergudangan" yang mengalami pertumbuhan positif pada 2023, masing-masing sebesar 4,80% dan 9,32%, menunjukkan kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi logistik kota. Pertumbuhan ini mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta menarik lebih banyak investasi.

Laju implisit PDRB, yang mencerminkan perubahan harga relatif terhadap output, juga memengaruhi daya saing Surakarta. Ketika laju implisit PDRB terkendali, inflasi dapat diminimalisasi, sehingga menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar. Hal ini mendukung daya beli masyarakat dan meningkatkan iklim investasi yang positif. Sebaliknya, jika laju implisit PDRB terlalu tinggi, biaya produksi meningkat dan

mengurangi efisiensi serta daya saing, khususnya bagi sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku dengan harga fluktuatif. Misalnya, sektor "Pengadaan Listrik dan Gas" yang memiliki laju implisit PDRB relatif stabil pada 2023 mendukung industri lain untuk beroperasi dengan biaya energi yang lebih kompetitif.

4. Potensi Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki beragam potensi yang dapat mendorong keunggulan kompetitif di tingkat regional dan nasional. Kota ini tidak hanya dikenal dengan warisan budayanya yang kaya, tetapi juga dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kehidupan sosial yang dinamis. Surakarta mampu memanfaatkan potensi ini untuk membangun daya saing di berbagai sektor, dari ekonomi hingga budaya, yang pada akhirnya memperkuat posisinya sebagai kota yang kompetitif di Indonesia.

1) Ekonomi

Salah satu pilar utama dalam keunggulan kompetitif Kota Surakarta adalah sektor ekonomi, khususnya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Surakarta memiliki potensi ekonomi yang signifikan di sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dengan brand yang dikenal sebagai “the Spirit of Java” dan “Kota Batik”, Surakarta telah mengembangkan reputasi sebagai kota kreatif. Sektor UMKM, terutama di bidang pariwisata, budaya, dan kuliner, berperan penting dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai medium pelestarian budaya dan penciptaan lapangan kerja. Ketahanan sektor UMKM di Surakarta mencerminkan kemampuan kota ini untuk beradaptasi dalam situasi ekonomi yang dinamis, sehingga menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi persaingan ekonomi di tingkat nasional.

Selain sektor UMKM, Surakarta juga mulai berkembang sebagai destinasi untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Meskipun Surakarta belum masuk dalam daftar 10 kota MICE utama di Indonesia, kota ini telah menjadi pilihan banyak Event Organizer (EO) dan Professional Conference Organizer (PCO) untuk mengadakan acara. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan MICE menjadi salah satu kunci keberhasilan Surakarta dalam menarik acara berskala nasional dan internasional. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal, MICE memiliki potensi besar untuk menjadi sektor unggulan yang dapat memperkuat daya saing ekonomi kota.

Sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menarik wisatawan dan pebisnis, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian lokal.

2) Stabilitas Politik

Stabilitas politik menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang penting bagi Surakarta. Kota ini dikenal dengan situasi politik yang stabil dan harmonis, yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana investor merasa lebih aman dan percaya untuk menanamkan modal di daerah ini. Pemerintah daerah Surakarta aktif mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan sosial. Di bawah pemerintahan yang stabil, Surakarta mampu menarik perhatian investor dan pengusaha untuk terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, dari perdagangan hingga industri kreatif. Keberhasilan dalam menciptakan stabilitas politik ini mencerminkan kemampuan kota untuk menjaga kesinambungan pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing di tingkat nasional.

3) Pendidikan

Selain faktor ekonomi dan politik, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membangun keunggulan kompetitif Surakarta. Kota ini dikenal memiliki beberapa pusat pendidikan yang berkualitas, termasuk universitas-universitas ternama dan sekolah-sekolah unggulan. Dengan adanya institusi pendidikan berkualitas, Surakarta memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Peningkatan kualitas pendidikan juga berhubungan langsung dengan inovasi dan kreativitas yang muncul dari generasi muda kota ini. Dengan demikian, Surakarta memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai kota pendidikan, yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan inovatif, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan teknologi di masa depan.

4) Sosial

Kehidupan sosial yang dinamis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keunggulan kompetitif Surakarta. Dengan berbagai kegiatan budaya dan komunitas yang aktif, kota ini menawarkan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Surakarta sering mengadakan berbagai acara dan festival yang melibatkan komunitas lokal, yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga mendorong munculnya berbagai ide kreatif dan usaha

baru. Kehidupan sosial yang inklusif dan dinamis ini juga berperan dalam menciptakan kota yang ramah bagi para pelaku bisnis dan wisatawan. Kehidupan sosial yang aktif mencerminkan keterbukaan masyarakat terhadap perubahan, yang merupakan modal penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi.

5) Warisan Budaya

Warisan budaya yang kaya juga menjadi modal penting bagi keunggulan kompetitif Surakarta. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam dalam bidang seni dan budaya, termasuk seni tradisional seperti wayang, batik, dan gamelan. Surakarta sering menjadi tuan rumah berbagai festival budaya yang menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Dengan adanya warisan budaya yang kaya ini, Surakarta mampu memposisikan diri sebagai salah satu destinasi wisata budaya terkemuka di Indonesia. Keberhasilan dalam mempromosikan budaya lokal juga berkontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata, yang merupakan salah satu sektor ekonomi penting di kota ini. Pariwisata budaya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor-sektor terkait seperti perhotelan, kuliner, dan industri kreatif lainnya.

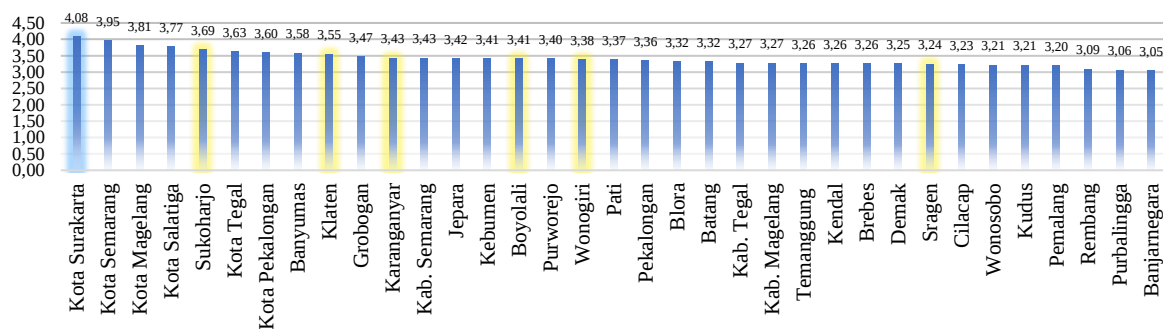
6) Pariwisata

Potensi pariwisata Surakarta juga tidak dapat diabaikan. Kota ini memiliki berbagai destinasi wisata sejarah dan budaya, seperti Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Taman Balekambang. Keberadaan destinasi wisata ini menjadikan Surakarta sebagai salah satu tujuan wisata utama di Jawa Tengah. Pemerintah daerah secara aktif mempromosikan potensi wisata kota melalui berbagai kampanye dan program pengembangan infrastruktur. Dengan potensi pariwisata yang besar, Surakarta memiliki peluang untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

B. Profil Umum IDSD Kota Surakarta versi BRIN

Pada tahun 2023, Kota Surakarta mencatatkan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 4,32 berdasarkan analisis pemetaan daya saing daerah, dan 4,08 berdasarkan hasil analisis BRIN, menjadikannya sebagai kota dengan skor IDSD tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Skor ini menempatkan Kota Surakarta di atas rata-rata IDSD Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 3,89. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki daya

saing yang unggul dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah, menegaskan posisinya sebagai pusat ekonomi dan budaya yang kuat di wilayah ini. Selain itu, Kota Surakarta juga mencatat skor tertinggi dalam sistem perwilayahan Subosukawonosraten, sebuah kerjasama regional yang mencakup beberapa kabupaten dan kota di sekitar Surakarta, dengan skor daya saing Subosukawonosraten secara keseluruhan berada pada angka 3,54. Kinerja Kota Surakarta ini menandakan bahwa kota ini memiliki fondasi yang kuat dalam aspek-aspek kunci yang mendukung daya saing daerah.



Gambar 3. 2 Skor Daya Saing Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah versi BRIN

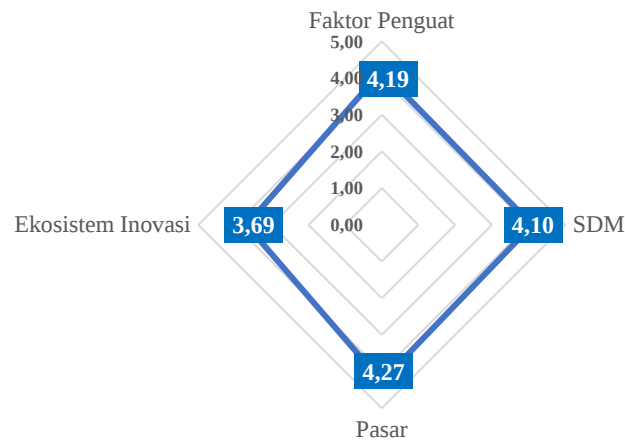
Berdasarkan analisis BRIN, daya saing Kota Surakarta terutama ditopang oleh faktor pasar, yang mencatat indeks tertinggi di antara faktor-faktor lain, yaitu sebesar 4,27. Faktor pasar ini mencerminkan kekuatan ekonomi Surakarta, yang didukung oleh akses keuangan yang luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nilai investasi yang signifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta pendapatan yang stabil dari sektor pajak dan retribusi. Keberadaan berbagai institusi keuangan yang mendukung UMKM di Kota Surakarta, seperti koperasi dan bank perkreditan rakyat, memberikan akses yang lebih mudah bagi pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha. Selain itu, besarnya nilai investasi PMDN di Surakarta juga menunjukkan kepercayaan investor dalam prospek ekonomi kota ini, yang tentunya berkontribusi pada peningkatan daya saing. Pendapatan dari sektor pajak dan retribusi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberlanjutan finansial daerah, yang pada akhirnya turut memperkuat posisi Surakarta dalam peta daya saing regional.

Faktor penguat atau *enabling environment* juga memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing Kota Surakarta, dengan indeks sebesar 4,19. Faktor ini mencakup berbagai aspek yang mendukung iklim investasi dan bisnis di kota ini, seperti infrastruktur yang memadai, regulasi yang mendukung, serta stabilitas politik dan keamanan. Surakarta

dikenal dengan infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan raya yang menghubungkan kota ini dengan wilayah lain di Jawa Tengah dan sekitarnya, serta aksesibilitas yang tinggi melalui transportasi umum yang efisien. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah kota juga dinilai mendukung perkembangan bisnis, dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat dalam pengurusan izin usaha. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga di Surakarta memberikan jaminan bagi para investor dan pengusaha untuk menjalankan usahanya tanpa gangguan berarti. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kota Surakarta.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital juga merupakan salah satu pilar penting dalam daya saing Kota Surakarta, dengan indeks sebesar 4,10. Kualitas SDM di Surakarta tercermin dari tingkat pendidikan yang relatif tinggi, serta ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Kota ini juga memiliki sejumlah institusi pendidikan yang berkualitas, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, yang menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, Surakarta juga dikenal dengan budaya yang kuat dalam hal kewirausahaan, di mana banyak penduduknya terlibat dalam usaha mikro dan kecil yang inovatif. Tingginya indeks SDM ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki potensi besar dalam hal pengembangan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global.

Meskipun Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam faktor pasar, penguat, dan SDM, ada satu area yang masih memerlukan perhatian lebih, yaitu ekosistem inovasi. Indeks ekosistem inovasi Kota Surakarta berada di angka 3,69, yang merupakan skor terendah di antara faktor-faktor lain. Rendahnya skor ini menunjukkan bahwa meskipun Surakarta memiliki potensi inovasi yang besar, terutama dengan adanya UPTD KST Solo Technopark yang bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan swasta, hasil dari inovasi tersebut belum sepenuhnya terkomersialisasikan secara optimal. Solo Technopark, sebagai pusat inkubasi bisnis dan inovasi, telah berupaya untuk mengembangkan berbagai inovasi di bidang teknologi dan industri kreatif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana inovasi-inovasi tersebut dapat diterima pasar dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian lokal. Hal ini menandakan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memperkuat ekosistem inovasi di Surakarta agar dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap daya saing daerah.



Gambar 3. 3 Aspek Daya Saing Kota Surakarta Veri BRIN

Akses keuangan yang baik bagi UMKM di Surakarta telah memberikan dampak positif pada perkembangan sektor ini, yang pada gilirannya memperkuat faktor pasar sebagai penopang utama daya saing kota. Investasi yang besar dari PMDN menunjukkan adanya kepercayaan investor dalam potensi ekonomi Surakarta, yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah yang pro-bisnis. Selain itu, pendapatan dari sektor pajak dan retribusi mencerminkan basis ekonomi yang solid dan berkelanjutan, yang memberikan fondasi kuat bagi pengembangan daya saing di masa depan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan potensi inovasi yang ada melalui ekosistem yang lebih terintegrasi dan mendukung komersialisasi hasil-hasil inovasi tersebut.

Dalam menghadapi tantangan global dan persaingan yang semakin ketat, Surakarta perlu terus memperkuat faktor-faktor yang telah menjadi penopang utama daya saingnya. Peningkatan kualitas ekosistem inovasi menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditangani untuk memastikan bahwa hasil-hasil inovasi dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pemerintah Kota Surakarta, bersama dengan berbagai stakeholder, perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung komersialisasi inovasi, termasuk dengan memperkuat kerjasama antara akademisi, industri, dan pemerintah. Selain itu, peningkatan akses pasar dan pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar global juga harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.

C. Analisis Pemetaan Daya Saing Kota Surakarta

Sebagai alternatif dari versi perhitungan BRIN, berdasarkan hasil Analisis PDSD berdasarkan data dukung yang bersumber dari BPS, SoloData dan Laporan Perangkat Daerah terkait indikator, Kota Surakarta memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya salah satu kota dengan daya saing tinggi di Indonesia dengan skor daya saing mencapai 4,329. Secara metode yang tidak berbeda dengan analisis BRIN, Pemetaan Daya saing Kota Surakarta diukur melalui empat aspek utama, yakni Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat/Enabling Environment, Sumber Daya Manusia (Human Capital), dan Faktor Pasar/Market. Penilaian ini menggambarkan bagaimana masing-masing aspek tersebut berkontribusi terhadap daya saing keseluruhan kota. Dari nilai-nilai yang tercantum, terlihat bahwa Kota Surakarta memiliki pendorong utama yaitu ekosistem inovasi yang kuat, diikuti oleh faktor pasar, faktor penguat, dan sumber daya manusia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang setiap aspek akan membantu kita memahami peran dan implikasinya dalam peningkatan daya saing kota ini.

1. Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Aspek

Aspek Ekosistem Inovasi merupakan yang paling menonjol dengan nilai tertinggi, yaitu 4.714. Ekosistem inovasi di Kota Surakarta mencakup berbagai elemen yang mendukung terciptanya lingkungan yang mendorong inovasi, kreativitas, dan transformasi ekonomi. Salah satu faktor kunci dari tingginya skor ini adalah keberagaman industri kreatif yang berkembang di kota ini, seperti batik, seni pertunjukan, dan kuliner. Dengan dukungan proaktif dari pemerintah daerah, kota ini telah berhasil menciptakan ruang-ruang inovatif bagi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk tumbuh dan bersaing di pasar nasional maupun global.

Selain itu, kehadiran berbagai program yang mendorong inovasi di sektor ekonomi kreatif, serta kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta, semakin memperkuat ekosistem inovasi di kota ini. Misalnya, festival budaya, pameran produk lokal, dan pengembangan infrastruktur teknologi telah memainkan peran penting dalam menciptakan suasana inovatif yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya Surakarta untuk menjadi kota yang ramah terhadap start-up dan industri kreatif, yang berdampak langsung terhadap daya saing secara keseluruhan.

Faktor Penguat atau Enabling Environment memperoleh nilai 4.133, yang menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif

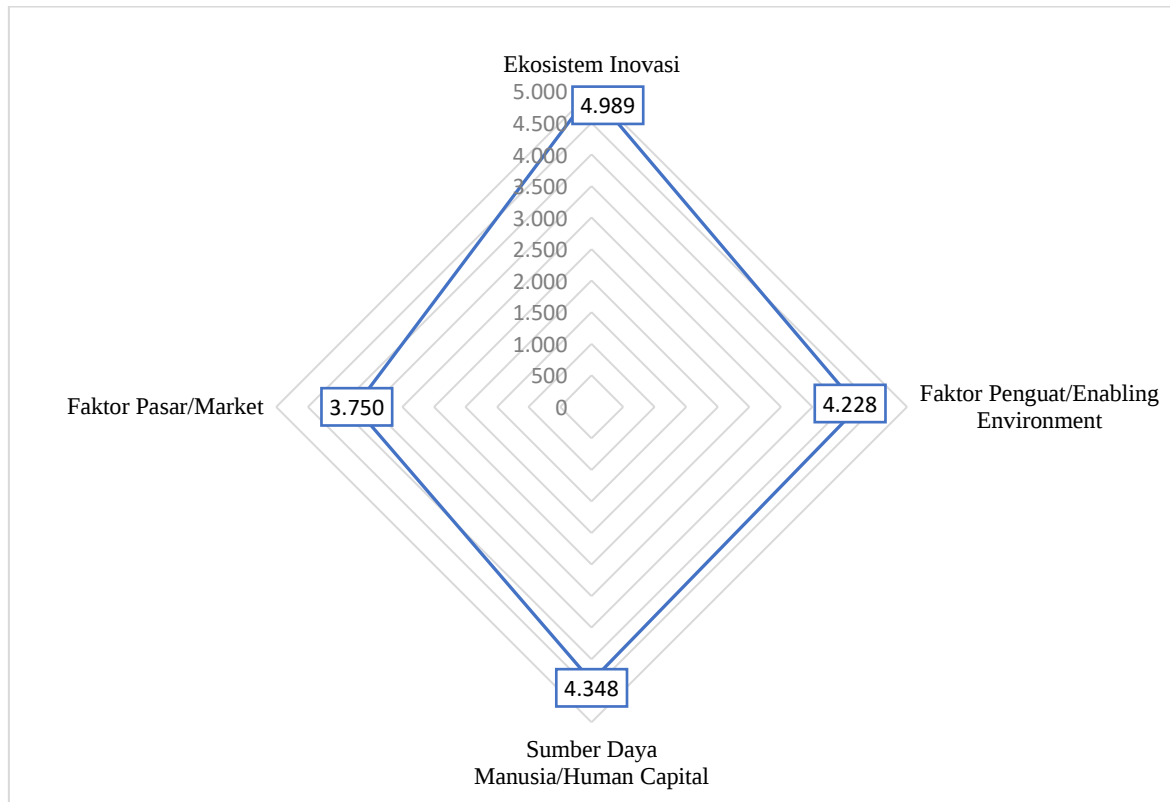
bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Faktor penguat ini mencakup infrastruktur, kebijakan pemerintah, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha dan inovasi. Stabilitas politik di Surakarta juga menjadi salah satu elemen penting yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung UMKM, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing kota di tingkat regional dan nasional.

Kota Surakarta juga telah meningkatkan infrastruktur fisik dan digital yang memadai untuk menunjang perkembangan ekonomi. Dengan adanya fasilitas transportasi yang baik, aksesibilitas yang mudah ke berbagai destinasi wisata dan pusat bisnis, serta jaringan internet yang semakin luas, Surakarta mampu menarik perhatian investor dan pelaku usaha untuk beroperasi di kota ini. Dukungan infrastruktur yang kuat merupakan landasan penting bagi daya saing kota, karena memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan lebih efisien dan produktif.

Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan aspek lainnya, yaitu 3.795. Meskipun demikian, ini masih merupakan elemen kunci dalam membangun daya saing Kota Surakarta. Sumber daya manusia mencakup tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan terampil, yang dibentuk oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang ada di kota ini. Surakarta memiliki sejumlah institusi pendidikan yang berkualitas, baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan perguruan tinggi berperingkat 100 besar nasional, yang menjadi sumber utama pengembangan bakat dan keterampilan. Dengan skor 3.795, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek ini. Kota Surakarta perlu terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pengembangan sektor-sektor strategis, seperti teknologi informasi, digitalisasi, dan industri kreatif, membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.

Aspek terakhir yang dinilai adalah Faktor Pasar dengan skor 4.188. Faktor pasar ini mencakup akses terhadap pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan adanya pasar-pasar tradisional yang terkenal, seperti Pasar Klewer dan Pasar Gede, serta berbagai sentra industri kreatif, kota ini mampu menjaga dinamika ekonomi yang berkelanjutan. Faktor pasar ini juga didukung oleh berbagai kegiatan MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition) yang semakin berkembang di kota ini, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih luas dan terdiversifikasi.



Gambar 3. 4 Daya Saing Surakarta berdasarkan Aspek

Secara keseluruhan, skor yang diberikan pada empat aspek utama di atas menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan internasional. Ekosistem Inovasi menjadi aspek unggulan yang paling menonjol, diikuti oleh Faktor Pasar dan Faktor Penguat, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial kota ini. Namun, Sumber Daya Manusia masih memerlukan perhatian lebih agar Surakarta dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada.

2. Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Pilar

daya saing Kota Surakarta diukur melalui beberapa pilar utama, yang mencakup Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, Kesiapan Teknologi, Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, dan Ukuran Pasar. Pilar-pilar ini memberikan gambaran yang

komprehensif tentang kekuatan dan tantangan yang dihadapi kota ini dalam meningkatkan daya saingnya.

Dinamika Bisnis mendapat nilai sempurna 5.000, yang menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki lingkungan bisnis yang dinamis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dinamika bisnis mencakup kemampuan kota untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan usaha, baik bagi usaha kecil, menengah, maupun besar. Surakarta dikenal memiliki banyak UMKM yang berkembang pesat, didukung oleh kebijakan lokal yang ramah terhadap pelaku bisnis. Aktivitas bisnis yang aktif ini menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi kota, menarik investor, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kapasitas Inovasi juga mendapatkan skor tinggi, yaitu 4.967, yang menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki kapasitas inovatif yang kuat. Kapasitas inovasi ini mencakup kemampuan kota untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang mendukung perkembangan ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan teknologi informasi. Pemerintah kota bersama dengan komunitas lokal telah menciptakan berbagai inisiatif untuk mendukung inovasi, termasuk penyelenggaraan pameran dan festival yang mempromosikan kreativitas lokal serta penyediaan akses kepada pelaku usaha untuk berinovasi.

Dengan nilai sempurna 5.000, Kesiapan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Surakarta siap memanfaatkan teknologi dalam mendukung perkembangan ekonominya. Kesiapan teknologi mencakup infrastruktur digital dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi terbaru. Kota ini telah membangun infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang luas dan layanan digital yang mendukung berbagai sektor usaha.

Kelembagaan di Kota Surakarta dinilai cukup baik dengan nilai 4.667. Aspek kelembagaan ini mencakup struktur pemerintahan, kualitas regulasi, dan efektivitas institusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang stabil dan regulasi yang mendukung telah menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan bisnis dan inovasi di kota ini. Kelembagaan yang baik juga mencerminkan adanya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Infrastruktur di Kota Surakarta mendapatkan skor 4.167, yang menunjukkan bahwa kota ini memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

meskipun masih ada beberapa area yang memerlukan peningkatan. Infrastruktur yang memadai mencakup transportasi, jaringan jalan, fasilitas publik, serta akses terhadap layanan dasar seperti air dan listrik. Infrastruktur yang baik adalah tulang punggung bagi kegiatan ekonomi yang efisien, karena memungkinkan barang dan jasa untuk bergerak dengan lancar di seluruh wilayah kota.

Skor Perekonomian Daerah menunjukkan bahwa ekonomi Kota Surakarta masih berada pada tahap pengembangan dengan nilai 3.850. Meskipun memiliki dinamika bisnis yang baik, ekonomi daerah ini masih menghadapi tantangan dalam diversifikasi sektor-sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Upaya perlu terus dilakukan untuk memperkuat perekonomian lokal, terutama dengan mendorong investasi dan memperkuat sektor-sektor strategis yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.

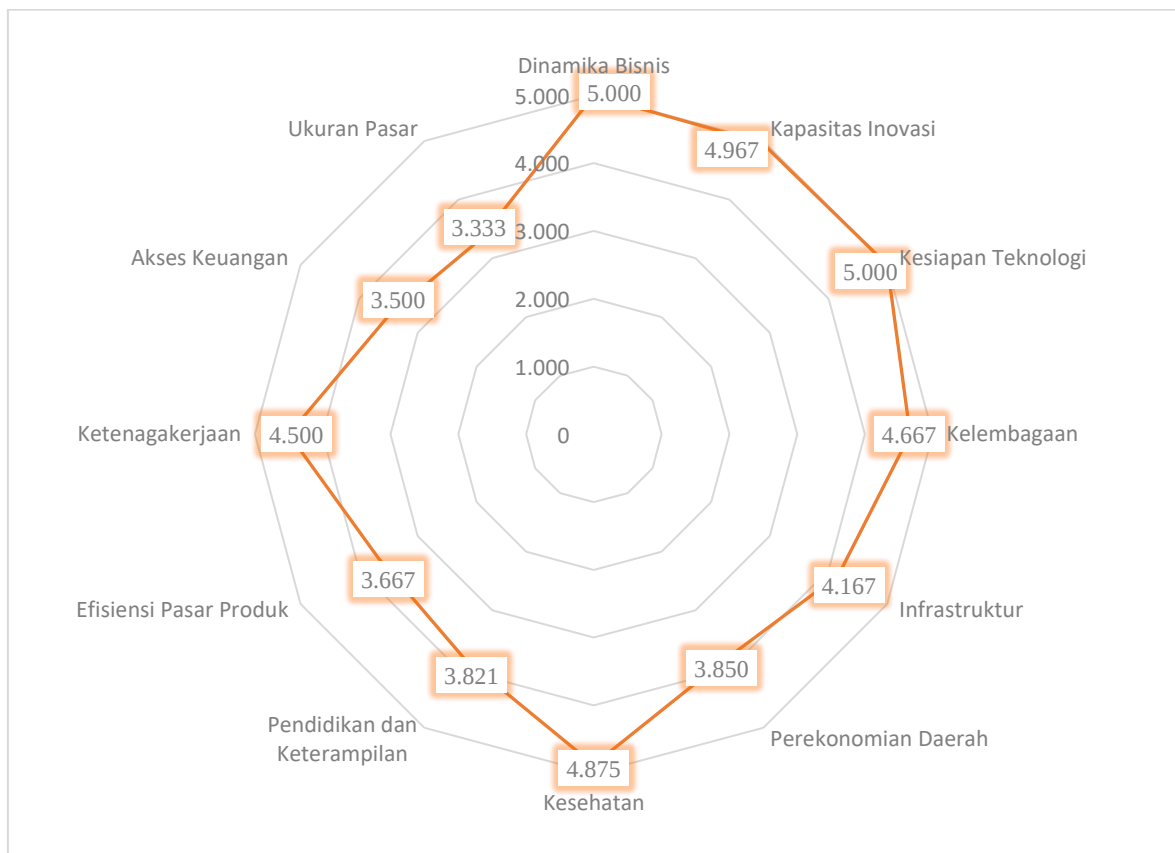
Kesehatan menjadi salah satu pilar yang sangat kuat di Kota Surakarta dengan nilai 4.875. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki sistem kesehatan yang baik, mencakup akses yang cukup terhadap layanan kesehatan, kualitas layanan medis, serta upaya kesehatan masyarakat yang efektif. Kesehatan masyarakat yang baik adalah salah satu fondasi penting untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing ekonomi kota.

Meskipun Surakarta memiliki beberapa institusi pendidikan yang berkualitas, Pendidikan dan Keterampilan dengan nilai 3.821 menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja modern sangat penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Peningkatan keterampilan di sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, ekonomi kreatif, dan manajemen bisnis menjadi fokus utama yang harus didorong.

Efisiensi Pasar Produk mendapatkan skor 3.667, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menciptakan pasar produk yang lebih efisien. Pengembangan kebijakan yang mendukung persaingan sehat dan mengurangi hambatan pasar akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pasar produk di Kota Surakarta. Skor Ketenagakerjaan yang cukup tinggi, yaitu 4.500, mencerminkan bahwa Kota Surakarta memiliki pasar tenaga kerja yang cukup baik, meskipun perlu terus dioptimalkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses Keuangan dengan nilai 3.500 menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan masih perlu ditingkatkan,

terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk berkembang.

Ukuran Pasar yang relatif rendah dengan nilai 3.333 menunjukkan bahwa Kota Surakarta masih menghadapi tantangan dalam memperluas pasar, terutama dalam skala nasional dan internasional. Meskipun demikian, upaya untuk memperluas akses pasar melalui digitalisasi dan peningkatan ekspor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skor ini di masa depan.



Gambar 3. 5 Daya Saing Surakarta berdasarkan Pilar

Daya saing Kota Surakarta berdasarkan pilar-pilar utama menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam dinamika bisnis, kesiapan teknologi, dan inovasi. Meskipun demikian, beberapa area seperti pendidikan, akses keuangan, dan ukuran pasar masih memerlukan perhatian lebih agar kota ini dapat lebih kompetitif di masa depan.

3. Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Dimensi

Daya saing Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa dimensi utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Setiap dimensi dinilai berdasarkan skor yang menunjukkan tingkat performa kota dalam area tersebut. Berdasarkan tabel yang disajikan, dimensi yang diukur meliputi regulasi, kewirausahaan, interaksi dan keberagaman, hingga ukuran pasar.

Dimensi yang Mendapatkan Skor Tertinggi Beberapa dimensi mendapatkan nilai sempurna, yakni Regulasi (5.000), Kewirausahaan (5.000), Interaksi dan Keberagaman (5.000), Komersialisasi (5.000), Telematika (5.000), dan Teknologi (5.000). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki kerangka regulasi yang kuat, iklim kewirausahaan yang mendukung, serta keragaman interaksi sosial yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, kemampuan komersialisasi dan perkembangan teknologi di kota ini juga dinilai sangat baik, yang berarti bahwa Surakarta siap bersaing dalam sektor bisnis modern berbasis teknologi dan inovasi.

Penelitian dan Pengembangan (R&D) Dengan nilai 4.900, dimensi Penelitian dan Pengembangan (R&D) menunjukkan bahwa Surakarta sudah berada di jalur yang baik dalam mengembangkan penelitian yang dapat diadopsi untuk kemajuan kota. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan upaya dalam inovasi, namun masih ada ruang untuk lebih meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan, terutama dalam memfasilitasi kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan institusi lainnya.

Tata Kelola Pemerintahan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan memperoleh nilai 4.333, yang menunjukkan tata kelola pemerintahan di Surakarta berjalan dengan baik, namun belum mencapai performa optimal. Ini bisa mencakup aspek transparansi, efisiensi, serta koordinasi antarlembaga pemerintahan. Meski demikian, dengan skor yang cukup tinggi, ada keyakinan bahwa tata kelola yang baik telah mendukung stabilitas dan pertumbuhan kota, meskipun masih bisa ditingkatkan lagi, terutama dalam hal efektivitas pelayanan publik.

Keamanan dan Ketertiban Skor sempurna 5.000 pada dimensi Keamanan dan Ketertiban menandakan bahwa Surakarta merupakan kota yang sangat aman dan tertib, yang penting untuk mendukung iklim investasi dan kesejahteraan sosial. Kota dengan keamanan yang baik tentu saja menarik bagi para investor dan pelaku usaha, selain juga meningkatkan kualitas hidup warga.

Infrastruktur Transportasi dan Infrastruktur Air Bersih serta Kelistrikan Dimensi Infrastruktur Transportasi mendapatkan skor 4.000, yang menandakan masih adanya tantangan di sektor transportasi. Infrastruktur yang ada perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain,

Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan dengan nilai 4.333 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, meskipun masih ada kebutuhan untuk memperbaiki akses dan distribusi yang lebih merata, terutama di daerah-daerah tertentu.

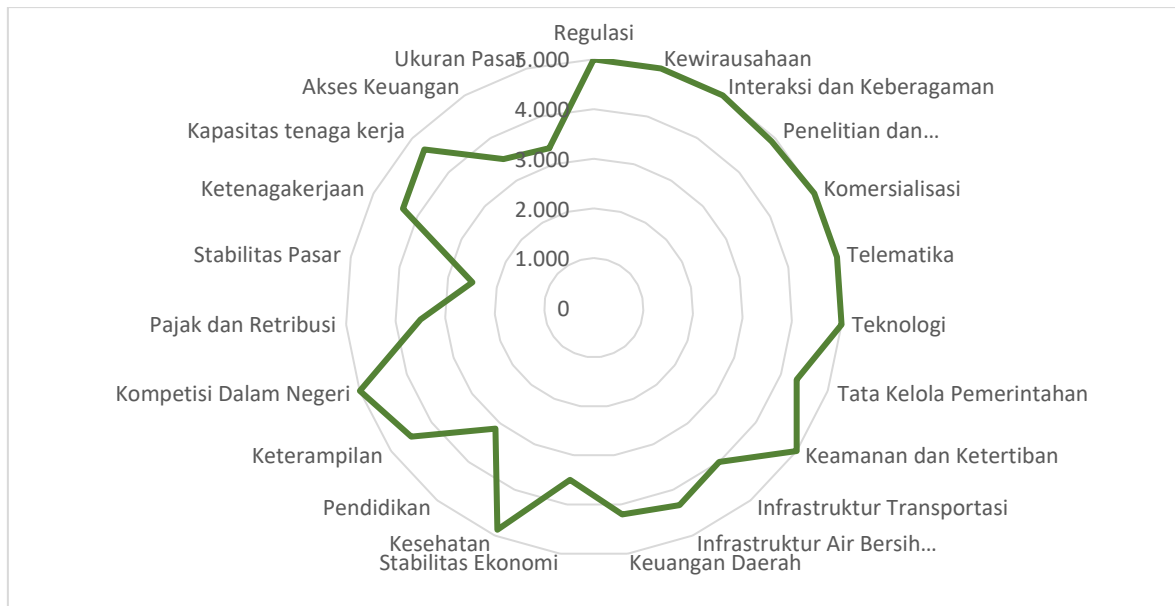
Keuangan Daerah dan Stabilitas Ekonomi Dimensi Keuangan Daerah memperoleh skor 4.200, yang menunjukkan manajemen keuangan daerah yang cukup baik. Ini merupakan hal yang penting bagi pengembangan ekonomi lokal, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan penerimaan daerah. Pada dimensi Stabilitas Ekonomi, nilai 3.500 mengindikasikan bahwa Surakarta masih menghadapi tantangan ekonomi, mungkin terkait dengan fluktuasi pasar atau ketidakstabilan yang muncul akibat perubahan global atau nasional.

Kesehatan dan Pendidikan Pada dimensi Kesehatan, Surakarta mendapatkan skor 4.875, yang menandakan pelayanan kesehatan di kota ini sudah sangat baik dan mampu memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Di sisi lain, dimensi Pendidikan hanya memperoleh skor 3.143, yang menjadi salah satu dimensi dengan nilai terendah. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur, kualitas pengajaran, hingga akses pendidikan yang merata.

Keterampilan dan Kapasitas Tenaga Kerja Dengan nilai 4.500 untuk dimensi Keterampilan dan 4.667 untuk Kapasitas Tenaga Kerja, Surakarta menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang baik dan kapabilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing kota di tingkat regional maupun nasional.

Kompetisi Dalam Negeri dan Pajak serta Retribusi Dimensi Kompetisi Dalam Negeri mendapatkan skor 5.000, yang menunjukkan bahwa Surakarta memiliki iklim persaingan yang sehat dan kondusif untuk bisnis. Di sisi lain, dimensi Pajak dan Retribusi hanya memperoleh skor 3.500, yang mungkin menandakan adanya tantangan dalam sistem perpajakan atau persepsi masyarakat terkait pajak. Upaya lebih lanjut dapat difokuskan pada penyederhanaan proses pajak dan transparansi.

Stabilitas Pasar dan Ukuran Pasar Dua dimensi ini mendapat nilai yang cukup rendah, yakni Stabilitas Pasar (2.500) dan Ukuran Pasar (3.333). Rendahnya skor pada stabilitas pasar mungkin mencerminkan ketidakpastian ekonomi atau pasar yang belum stabil, sedangkan ukuran pasar yang rendah menunjukkan bahwa skala ekonomi di Surakarta masih tergolong kecil, yang mungkin membatasi pertumbuhan dan daya tarik investasi.



Gambar 3. 6 Daya Saing Surakarta berdasarkan Dimensi

Kota Surakarta memiliki beberapa keunggulan signifikan dalam aspek regulasi, kewirausahaan, keamanan, serta teknologi. Meski begitu terdapat beberapa dimensi yang perlu mendapat intervensi lebih, meliputi pendidikan, stabilitas ekonomi, dan infrastruktur transportasi. Jika Surakarta mampu meningkatkan performa pada dimensi-dimensi tersebut, maka daya saing Kota Surakarta di masa depan dapat lebih optimal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. Analisis Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta berdasarkan Skor Daya Saing

Kota Surakarta telah mencatat skor daya saing yang signifikan sebesar 4,329, menempatkannya sebagai kota dengan kategori "sangat tinggi." Skor ini diperoleh melalui penilaian empat aspek utama: Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat (Enabling Environment), Sumber Daya Manusia, dan Faktor Pasar. Hasil ini mencerminkan potensi besar kota untuk terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur, inovasi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Dalam hal ini, penting bagi Kota Surakarta untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang selaras dengan hasil pemetaan daya saing dan kondisi eksisting kota. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan program-program yang telah diinisiasi oleh pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memperkuat daya saing di masa mendatang.

1. Pengembangan Infrastruktur

Aspek infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil pemetaan daya saing, Pilar Infrastruktur mencatat skor sebesar 4,167, yang menekankan pentingnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Kebijakan utama yang perlu diperhatikan adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu, penting untuk memperluas jaringan transportasi umum yang terintegrasi dengan teknologi, seperti sistem pemesanan tiket online, yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mendukung upaya digitalisasi kota. Hal ini sejalan dengan kebijakan RPJMD yang menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi juga harus menjadi prioritas untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang saat ini kurang terjangkau oleh layanan tersebut.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia mendapatkan skor 4,348, menandakan adanya potensi besar dalam pengembangan kualitas tenaga kerja dan pendidikan di Kota Surakarta. Kebijakan pembangunan harus difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Hal ini termasuk pembangunan sekolah baru di wilayah yang memerlukan, serta renovasi sekolah yang sudah ada untuk memastikan tersedianya fasilitas yang layak. Selain itu, penting untuk memperluas program beasiswa bagi siswa berprestasi, serta menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor-sektor ekonomi kreatif dan teknologi. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan RPJMD untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Penguatan sektor pendidikan ini tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas SDM lokal tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pengurangan tingkat pengangguran.

3. Penguatan Ekonomi Lokal dan Diversifikasi Sektor

Dengan skor pada Pilar Perekonomian Daerah sebesar 3,850, kebijakan pembangunan ekonomi lokal di Kota Surakarta harus diarahkan pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta promosi sektor pariwisata. Program pengembangan UMKM

melalui pelatihan manajemen dan pemberian akses permodalan dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Di samping itu, pengembangan destinasi wisata baru serta promosi wisata budaya, sejarah, dan kuliner juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik wisata kota. Diversifikasi ekonomi, terutama di sektor ekonomi kreatif dan pertanian berkelanjutan, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan mendorong inovasi. Kebijakan ini didukung oleh RPJMD yang mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal.

4. Penguatan Inovasi dan Teknologi

Kota Surakarta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan inovasi dan teknologi, terbukti dengan skor tinggi pada Pilar Kapasitas Inovasi (4,967) dan Kesiapan Teknologi (5,000). Kebijakan pembangunan di bidang ini harus mencakup pendirian pusat inovasi yang menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) bagi perusahaan startup dan sektor teknologi. Pusat inovasi ini dapat berperan sebagai inkubator bagi usaha-usaha baru yang berorientasi teknologi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Selain itu, digitalisasi layanan publik melalui pengembangan aplikasi yang mempermudah akses layanan seperti perizinan dan pembayaran pajak akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat juga harus diakselerasi melalui program pelatihan teknologi yang diperuntukkan bagi berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung RPJMD yang menekankan pentingnya inovasi dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.

5. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pada aspek kesehatan, Kota Surakarta mencatat skor 4,875, menunjukkan kualitas yang relatif tinggi. Namun demikian, kebijakan pembangunan harus tetap fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan dengan membangun dan merenovasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Selain itu, kampanye kesehatan preventif seperti vaksinasi dan promosi gaya hidup sehat harus terus ditingkatkan untuk menurunkan angka penyakit menular. Program kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan kepada keluarga kurang

mampu dan pemberdayaan masyarakat harus diperluas untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebijakan ini sejalan dengan RPJMD yang menargetkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Praktik Bisnis Berkelanjutan

Keunggulan daya saing Surakarta secara langsung berkaitan dengan potensinya dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pilar-pilar seperti dinamika bisnis, kesiapan teknologi, dan kelembagaan yang kuat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan efisiensi. Dengan dinamika bisnis yang mencapai skor sempurna (5.000), Surakarta dapat menggerakkan sektor swasta dalam menjalankan praktik-praktik bisnis berkelanjutan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Kesiapan teknologi yang tinggi (5.000) juga memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan dan solusi digital yang mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, dengan skor kelembagaan yang kuat (4.667), Surakarta memiliki mekanisme tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan, sehingga setiap inisiatif yang diambil memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 telah menetapkan arah pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Salah satu kebijakan penting dalam RPJMD ini adalah penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital, yang sejalan dengan potensi Surakarta dalam dinamika bisnis dan kesiapan teknologi. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong inklusi digital dan inovasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.

Potensi Surakarta dalam mengadopsi ekonomi hijau juga tercermin dalam kebijakan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Salah satu inisiatif utama yang relevan adalah pengembangan kawasan pedestrian yang mendukung mobilitas berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup di dalam kota, tetapi juga menciptakan contoh kebijakan berkelanjutan yang dapat ditiru oleh kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

E. Analisis Peran Surakarta dalam Kebijakan Pembangunan Subosukawonosraten

Konsep kutub pertumbuhan dalam teori ekonomi regional merujuk pada *“wilayah atau kota yang memainkan peran sentral sebagai motor penggerak dalam pembangunan ekonomi wilayah sekitarnya”*. Kota-kota ini sering memiliki potensi unggulan dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi, yang kemudian memberikan dampak positif pada daerah-daerah sekitarnya. Peran Kota Surakarta dalam konteks kutub pertumbuhan diukur melalui keunggulan daya saing berdasarkan pilar dibandingkan dengan wilayah lain dalam sistem perwilayahan yang meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

1. Peran Surakarta dalam Konsep "Kutub Pertumbuhan" di Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten

Dengan sudut pandang Peran Surakarta dalam “konsep kutub pertumbuhan” di Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten, Surakarta memiliki nilai daya saing tertinggi di antara wilayah lain di Subosukawonosraten, dengan skor 4.329 yang tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi." Dalam konteks "konsep kutub pertumbuhan," Surakarta berperan sebagai pusat ekonomi dan inovasi yang menggerakkan dinamika wilayah-wilayah sekitarnya, yaitu Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Dengan pilar-pilar unggulan seperti dinamika bisnis (5.000), kesiapan teknologi (5.000), dan kapasitas inovasi (4.967), Surakarta memiliki daya dorong yang kuat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah tersebut.

Selain keunggulan skor pilar daya saing, Kota Surakarta juga memiliki potensi signifikan dalam hal konektivitas dan aksesibilitas regional. Dengan posisi geografis yang strategis, Surakarta menjadi hub transportasi yang menghubungkan wilayah Subosukawonosraten dengan kawasan lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang, termasuk transportasi massal seperti Bandara Adi Soemarmo dan akses kereta api cepat yang akan datang. Selain itu, Surakarta juga dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata, dengan warisan sejarah yang kuat seperti Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Kampung Batik Laweyan. Ini memberikan nilai tambah bagi kota dalam menarik investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dapat memengaruhi pertumbuhan wilayah-wilayah sekitarnya melalui pariwisata lintas kabupaten dan program-program kolaborasi ekonomi kreatif yang terintegrasi.

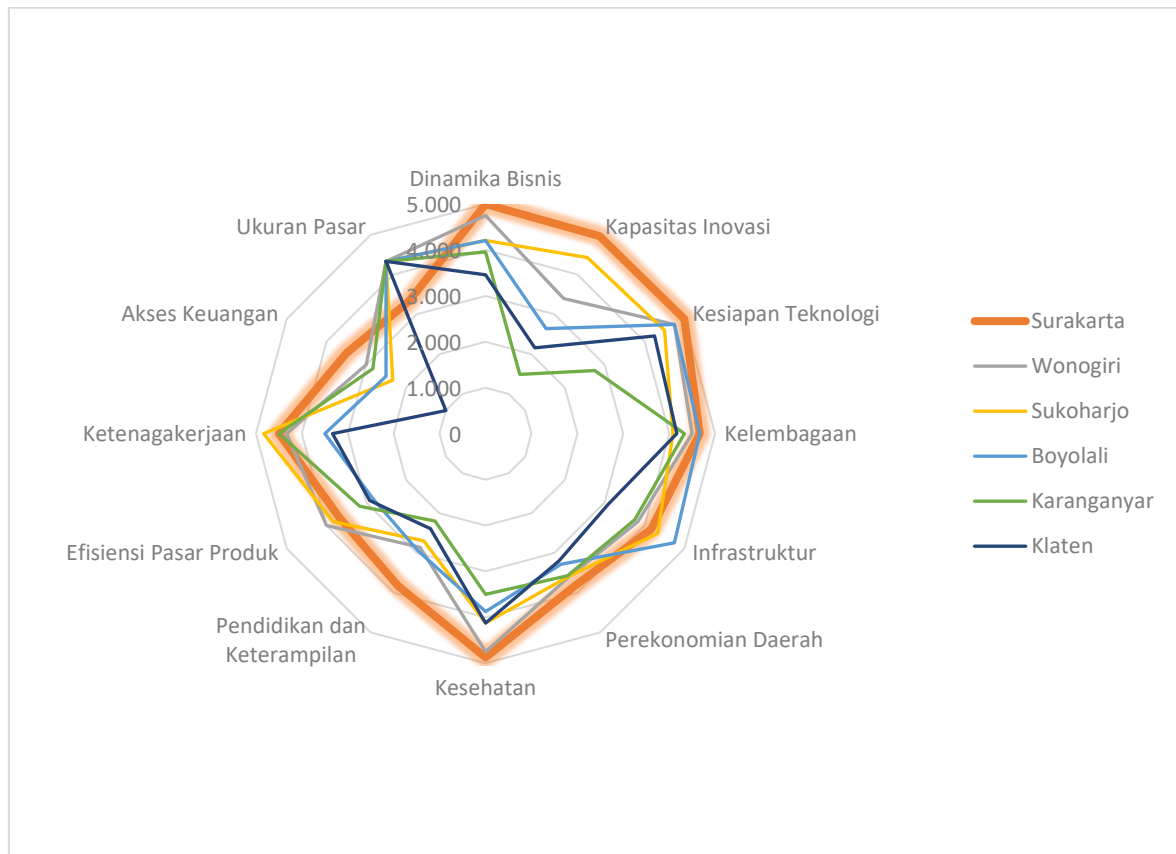
Sebagai Kutub Pertumbuhan, peran Surakarta dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada kota itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Dengan keunggulan pada pilar-pilar seperti infrastruktur (4.167), pendidikan dan keterampilan (3.821), serta efisiensi pasar produk (3.667), Surakarta dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan infrastruktur hijau yang mendukung mobilitas berkelanjutan di seluruh wilayah, seperti transportasi publik yang efisien dan jaringan jalan yang ramah lingkungan. Lebih jauh lagi, Surakarta dapat menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja berkelanjutan bagi wilayah sekitarnya, mengisi kekosongan dalam pendidikan dan keterampilan di wilayah seperti Karanganyar (2.196) dan Klaten (2.393), yang memiliki skor lebih rendah dalam pilar tersebut.

Surakarta memiliki potensi untuk memimpin penerapan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Subosukawonosraten. Berdasarkan RPJMD, salah satu fokus penting adalah kolaborasi antarwilayah untuk memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi. Surakarta, sebagai pusat pertumbuhan, dapat menginisiasi program-program pembangunan infrastruktur bersama dengan wilayah lain, seperti pengembangan transportasi antarkabupaten yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, Surakarta juga dapat berperan dalam mendistribusikan pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam RPJMD yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja dapat diperluas ke wilayah-wilayah tetangga melalui kemitraan pendidikan dan pelatihan kerja yang terintegrasi, membantu daerah-daerah seperti Karanganyar dan Wonogiri meningkatkan daya saing mereka.

2. Analisis Keunggulan Pilar Surakarta untuk Menutup Kelemahan Wilayah Lainnya

Surakarta memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan di wilayah-wilayah lain dalam sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Sebagai contoh, Klaten memiliki kelemahan signifikan dalam akses keuangan (1.000), namun Surakarta dengan skor akses keuangan sebesar 3.500 dapat menjadi penyedia solusi finansial melalui kemitraan lintas wilayah, seperti program-program inklusi keuangan dan penyaluran modal kerja bagi UMKM di wilayah yang membutuhkan. Selain itu, kapasitas inovasi di Karanganyar (1.489) juga sangat rendah dibandingkan dengan Surakarta (4.967), yang berarti Surakarta dapat memainkan peran sebagai pusat inovasi, menyediakan platform untuk transfer pengetahuan dan teknologi bagi kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal

dalam hal inovasi. Lebih jauh, dengan kesiapan teknologi yang tinggi, Surakarta dapat menginisiasi program-program kolaboratif di bidang teknologi digital, meningkatkan efisiensi dan daya saing wilayah lain dalam ekosistem Subosukawonosraten.



Gambar 3. 7 Daya Saing Surakarta di Wilayah Subosukawonosraten

Kelemahan wilayah lain di Subosukawonosraten, seperti keterbatasan akses keuangan di Klaten, dapat diatasi melalui kebijakan inklusi keuangan yang sedang dikembangkan di Surakarta. RPJMD Kota Surakarta mencakup program pemberdayaan UMKM dan pengembangan akses permodalan melalui lembaga keuangan lokal dan digital. Dengan demikian, Surakarta dapat menjadi katalisator dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif di wilayah Subosukawonosraten. Salah satu inisiatif yang dapat diambil Surakarta adalah memperluas akses digital keuangan di wilayah-wilayah dengan daya saing rendah melalui program pendampingan bisnis dan akses modal yang lebih mudah. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Surakarta untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik dan sektor swasta.

Tabel 3. 6 Peran Kota Surakarta dalam Kutub Pertumbuhan Subosukawonosraten

Kota/ Kabupaten	Peran dalam Kutub Pertumbuhan	Kekuatan Utama
Kota Surakarta	Pusat ekonomi, logistik, budaya, dan pariwisata; pemimpin inovasi dan konektivitas regional.	Infrastruktur transportasi, pusat pariwisata, ekonomi kreatif, inovasi digital, ekonomi hijau.
Boyolali	Pemasok komoditas pertanian dan kawasan industri pendukung.	Pertanian, peternakan, dan dukungan kawasan industri (bandara Adi Soemarmo).
Sukoharjo	Kawasan industri dan pendukung sektor manufaktur.	Industri manufaktur, akses ke jalur transportasi dan logistik.
Karanganyar	Destinasi wisata alam dan pengembangan pertanian organik.	Pariwisata alam (Tawangmangu), pertanian organik.
Wonogiri	Pengembangan pariwisata alam dan potensi tambang.	Potensi wisata (waduk dan pegunungan), tambang kapur.
Sragen	Pengembangan sektor pertanian dan industri berbasis agrikultur.	Pertanian dan perkebunan, industri berbasis agrikultur, wisata budaya (Museum Purbakala Sangiran).
Klaten	Pengembangan sektor pariwisata, industri kecil dan menengah (IKM), serta pertanian.	Potensi wisata candi, pertanian, industri kecil, dan menengah.

Dengan potensi Surakarta sebagai pusat ekonomi, pariwisata, dan teknologi, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD, Surakarta memiliki fondasi kuat untuk memainkan peran penting sebagai kutub pertumbuhan dalam sistem perwilayahan Subosukawonosraten. Keunggulan daya saing kota ini tidak hanya menguntungkan penduduk Surakarta sendiri, tetapi juga wilayah-wilayah sekitarnya yang akan merasakan dampak positif dari kolaborasi regional dan transfer pengetahuan. Program-program pembangunan yang terintegrasi lintas wilayah akan memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga seluruh sistem perwilayahan Subosukawonosraten dapat berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.

F. Analisis Pendalaman Isu Daya Saing Daerah dan Konteks Kebijakan Pembangunan Sistem Perwilayahan Subosukawonosraten

Dalam konteks pembangunan wilayah, Subosukawonosraten merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah yang memiliki daya saing unik dan potensi besar untuk dikembangkan. Tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah di kawasan ini masih cukup kompleks, terutama terkait dengan kesenjangan dalam akses infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta disparitas ekonomi antar-kabupaten. Meskipun Kota Surakarta telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dominan, peran kabupaten-kabupaten pendukung di sekitarnya belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Oleh

karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai isu daya saing di setiap kabupaten serta bagaimana kebijakan pembangunan wilayah dapat diarahkan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar-daerah di Subosukawonosraten.

Kota Surakarta berperan sebagai motor utama penggerak ekonomi di kawasan ini, terutama dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif. Sebagai pusat ekonomi dan budaya, Surakarta memiliki infrastruktur yang cukup maju dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi regional. Tantangan daya saing yang dihadapi Surakarta terletak pada tekanan pertumbuhan populasi, keterbatasan lahan, dan kebutuhan untuk lebih mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam sistem ekonomi. Kota ini juga menghadapi tantangan dalam memperluas peran sebagai pusat logistik dan perdagangan untuk wilayah sekitarnya, di mana konektivitas dengan kabupaten-kabupaten tetangga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kabupaten-kabupaten di sekitar Surakarta, seperti Boyolali, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen, memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Boyolali dikenal sebagai kawasan dengan sektor pertanian dan peternakan yang kuat, serta keberadaan kawasan industri yang terus berkembang berkat kedekatannya dengan Bandara Adi Soemarmo. Sementara itu, Klaten dan Karanganyar memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata dan industri kecil menengah (IKM), yang keduanya menyokong ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata budaya. Tantangan terbesar di kabupaten-kabupaten ini adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing regional secara keseluruhan. Hal ini memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan terpadu, di mana setiap kabupaten dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan kekuatan utamanya.

Kebijakan pembangunan sistem perwilayahan Subosukawonosraten yang diatur dalam RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah menekankan pentingnya pengembangan konektivitas antar-wilayah serta diversifikasi ekonomi. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, pariwisata, dan pertanian diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih resilient dan inklusif. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dan jalur kereta api, berperan penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa antar-kabupaten. Keberhasilan dari kebijakan ini sangat tergantung pada harmonisasi kebijakan di tingkat daerah dan provinsi, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan daya saing Subosukawonosraten adalah bagaimana memperkuat kolaborasi antar-daerah dan mengatasi disparitas yang masih ada. Sebagai ilustrasi, Kabupaten Sragen, yang memiliki potensi kuat di sektor agrikultur, memerlukan dukungan kebijakan yang mendorong industrialisasi berbasis pertanian serta peningkatan nilai tambah produk agrikultur. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata budaya di Sragen, yang berpusat pada Museum Purbakala Sangiran, juga memerlukan investasi lebih lanjut untuk menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi yang relevan.

Isu daya saing daerah di Subosukawonosraten tidak dapat diatasi tanpa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pengembangan kawasan ini harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat kota Surakarta dan pengembangan potensi daerah di kabupaten sekitarnya. Selain itu, kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan daya saing regional. Dengan demikian, Subosukawonosraten dapat bertransformasi menjadi kawasan pertumbuhan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

BAB IV

REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Rekomendasi

Pemetaan daya saing yang dilakukan menunjukkan berbagai kekuatan dan kelemahan di berbagai dimensi, termasuk Regulasi, Kewirausahaan, Interaksi dan Keberagaman, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Komersialisasi, Telematika, Teknologi, Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan, Keuangan Daerah, Stabilitas Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Keterampilan, Kompetisi Dalam Negeri, Pajak dan Retribusi, Stabilitas Pasar, Ketenagakerjaan, Kapasitas tenaga kerja, Akses Keuangan, serta Ukuran Pasar. Meskipun beberapa dimensi menunjukkan hasil yang positif dengan skor maksimal yaitu 5.00, masih terdapat area-area yang membutuhkan perhatian khusus yang skornya masih kurang dari 4.00.

Tabel 4. 1 Skor Daya Saing Surakarta berdasarkan Dimensi

Dimensi	Nilai
Regulasi	5.000
Kewirausahaan	5.000
Interaksi dan Keberagaman	5.000
Penelitian dan Pengembangan (R & D)	4.900
Komersialisasi	5.000
Telematika	5.000
Teknologi	5.000
Tata Kelola Pemerintahan	4.333
Keamanan dan Ketertiban	5.000
Infrastruktur Transportasi	4.000
Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	4.333
Keuangan Daerah	4.200
Stabilitas Ekonomi	3.500
Kesehatan	4.875
Pendidikan	3.143
Keterampilan	4.500
Kompetisi Dalam Negeri	5.000
Pajak dan Retribusi	3.500
Stabilitas Pasar	2.500
Ketenagakerjaan	4.333
Kapasitas tenaga kerja	4.667
Akses Keuangan	3.500
Ukuran Pasar	3.333

Sumber: Pemetaan Daya Saing Kota Surakarta, 2023

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terarah menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi Kota Surakarta dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan 6 dimensi dengan skor rendah (kurang dari 4.00) yang telah diukur dalam Pemetaan Daya Saing Kota Surakarta antara lain:

1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi

Skor stabilitas ekonomi yang rendah (3.500) menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi kebijakan:

- 1) **Diversifikasi Ekonomi:** Pemerintah Kota Surakarta dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-tradisional seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan teknologi berbasis digital. Mengoptimalkan potensi industri kreatif yang telah berkembang di kota ini dapat memberikan sumber pendapatan baru.
- 2) **Kemitraan Strategis:** Menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dalam memaksimalkan investasi pada sektor industri kecil-menengah (UMKM) dan industri padat karya. Kemitraan ini bisa diwujudkan dengan menghubungkan pelaku usaha lokal ke pasar yang lebih luas melalui program "Surakarta sebagai Hub Ekonomi Kreatif" di wilayah Subosukawonosraten.

2. Perbaikan Kualitas Pendidikan

Skor pendidikan yang rendah (3.143) mencerminkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Kota Surakarta perlu mengoptimalkan pendidikan vokasional untuk mengurangi kesenjangan ini. Rekomendasi kebijakan:

- 1) **Penguatan Sekolah Vokasional (SMK):** Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah vokasional, SMK, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Surakarta dengan mengembangkan program kurikulum yang berbasis keterampilan praktis dan kebutuhan industri. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pelaku industri lokal dan nasional untuk memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 2) **Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI:** Pemerintah Kota Surakarta dapat menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti sektor pariwisata, teknologi informasi, manufaktur, dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan memberikan pengakuan resmi terhadap keterampilan lulusan sekolah vokasional dan perguruan tinggi sehingga mereka lebih kompetitif di pasar kerja.

- 3) Sosialisasi Kurikulum Berbasis Pasar Kerja: Melakukan sosialisasi terhadap kurikulum berbasis SKKNI ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan vokasional di Surakarta. Kurikulum ini harus selaras dengan perkembangan industri dan pasar kerja, termasuk sektor-sektor unggulan di Surakarta seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terdidik.

3. Optimalisasi Pajak dan Retribusi

Skor pajak dan retribusi yang rendah (3.500) menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah. Dengan kondisi ekonomi yang berkembang serta posisi strategis Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan Subosukawonosraten, pemerintah perlu mengambil langkah inovatif untuk memperkuat sektor ini. Rekomendasi kebijakan:

- 1) Digitalisasi Layanan Pajak dan Retribusi dengan Integrasi Data Big Data dan AI: Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi Big Data dan Artificial Intelligence (AI) untuk mengidentifikasi potensi pendapatan dari sektor-sektor tertentu yang belum tergarap optimal. Misalnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat di Surakarta bisa menjadi target optimalisasi retribusi dan pajak berbasis data ini. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memetakan potensi pajak secara lebih presisi, memantau kepatuhan wajib pajak, serta memprediksi tren pendapatan daerah secara real-time.
- 2) Penerapan Skema Pajak Berbasis Ekonomi Hijau dan Inklusif: Mengembangkan skema pajak yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas, seperti pajak hijau yang memberikan insentif kepada usaha atau individu yang menjalankan praktik bisnis ramah lingkungan. Skema ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong perubahan positif di sektor-sektor ekonomi lokal seperti industri

kreatif, pariwisata, dan UMKM agar lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan penerapan pajak berbasis sosial yang mendukung program-program inklusi sosial, seperti pembangunan fasilitas umum yang mendukung kelompok marjinal.

- 3) **Pengembangan Aplikasi Pajak Mandiri untuk UMKM:** Menciptakan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan pelaku UMKM membayar pajak dan retribusi secara mandiri dan mudah. Aplikasi ini dapat disertai fitur edukasi terkait pajak untuk UMKM sehingga memudahkan mereka dalam memahami kewajiban pajak dan retribusi. Mengingat Kota Surakarta memiliki basis UMKM yang kuat, inovasi ini berpotensi meningkatkan partisipasi dan kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak tanpa menambah beban administrasi pemerintah.
- 4) **Pengembangan Zona Pajak Kreatif dan Pengurangan Tarif Pajak Sektor Unggulan:** Pemerintah Kota Surakarta dapat mempertimbangkan untuk menerapkan zona pajak kreatif, di mana bisnis di sektor ekonomi kreatif (misalnya, seni, musik, desain, dan media digital) memperoleh insentif pajak atau pengurangan tarif. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang sudah menjadi salah satu kekuatan utama kota, sekaligus meningkatkan daya saing lokal. Selain itu, pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah untuk sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, kuliner, dan kerajinan lokal bisa meningkatkan daya tarik investasi di Surakarta.

4. Peningkatan Stabilitas Pasar

Dengan skor stabilitas pasar sebesar 2.500, kebijakan yang berfokus pada penguatan daya saing pasar sangat diperlukan. Rekomendasi kebijakan:

- 1) **Pengembangan Pasar Tradisional:** Modernisasi pasar-pasar tradisional menjadi lebih bersih, teratur, dan berteknologi untuk meningkatkan daya saing dengan pusat perbelanjaan modern. Ini dapat mendukung ekonomi lokal sekaligus mempertahankan budaya dan identitas kota sebagai pusat perdagangan.
- 2) **Regulasi Pasar yang Dinamis:** Membuat regulasi yang fleksibel dan pro-bisnis, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan UMKM. Ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing di pasar terbuka.
- 3) **Penguatan Pasar Online:** Mendorong pelaku UMKM untuk beralih atau berintegrasi ke pasar online, baik melalui pelatihan digital marketing maupun penyediaan platform lokal yang memfasilitasi transaksi online.

5. Akses Keuangan yang Lebih Inklusif

Skor akses keuangan yang rendah (3.500) mencerminkan perlunya penguatan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Rekomendasi kebijakan:

- 1) Pengembangan Program Keuangan Mikro: Mendorong peran bank daerah dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas layanan kredit kepada UMKM dan pengusaha kecil, terutama di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi lembaga keuangan yang memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang minim akses perbankan.
- 2) Inovasi Produk Keuangan: Mengembangkan produk-produk keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil, seperti pinjaman tanpa agunan atau kredit berbasis penghasilan masa depan bagi sektor informal dan usaha kreatif.

6. Perluasan Ukuran Pasar

Skor rendah pada dimensi ukuran pasar (3.333) menunjukkan keterbatasan akses Surakarta terhadap pasar yang lebih luas. Rekomendasi kebijakan:

- 1) Kolaborasi Antar Daerah: Mendorong kerjasama antar kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten dalam pengembangan pasar bersama, baik untuk komoditas pertanian, produk UMKM, maupun sektor pariwisata. Ini akan memperluas cakupan pasar regional dan meningkatkan penetrasi produk lokal.
- 2) Peningkatan Daya Tarik Wisata: Sebagai bagian dari peran Surakarta sebagai pusat kebudayaan, potensi wisata perlu dioptimalkan dengan memperbaiki aksesibilitas, infrastruktur pariwisata, dan promosi digital. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga memperbesar pasar bagi produk lokal dan industri kreatif.

BAB V
REKOMENDASI PEMANFAATAN IDSD UNTUK KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

A. Kerangka Konsep Rekomendasi Pemanfaatan IDSD untuk Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat strategis yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan berbagai aspek pembangunan suatu daerah. Untuk menyusun "Rekomendasi Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta," yang akan dijadikan kerangka konsep bagi perumusan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kerangka ini harus berbasis bukti dari data yang dihasilkan oleh indeks tersebut serta berfokus pada penguatan dimensi-dimensi yang memiliki skor rendah.

1. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang pentingnya IDSD sebagai instrumen pengukuran daya saing daerah. Sebagai kota di wilayah Subosukawonosraten, Surakarta memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pentingnya pemanfaatan data IDSD dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah di Kota Surakarta mencerminkan kebutuhan untuk merespon tantangan di berbagai sektor.

2. Tujuan Pemanfaatan IDSD

Menggambarkan tujuan utama dari pemanfaatan data IDSD, yang mencakup:

- 1) Mengidentifikasi Kelemahan: Menggunakan skor dimensi yang rendah untuk menemukan area-area yang memerlukan intervensi kebijakan.
- 2) Menetapkan Prioritas Pembangunan: Fokus pada perbaikan dimensi yang memiliki dampak besar pada daya saing kota.
- 3) Memperkuat Daya Saing Ekonomi: Melalui kebijakan yang berbasis bukti, meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan regional.

3. Dimensi-Dimensi yang Perlu Diperkuat (Skor <4.00)

Pada bagian ini, masing-masing dimensi yang mendapatkan skor rendah dijabarkan secara lebih rinci, dengan rekomendasi kebijakan yang relevan.

4. Indikator Keberhasilan

Menyusun indikator keberhasilan yang spesifik dan dapat diukur, misalnya:

- 1) Peningkatan skor IDSD pada dimensi-dimensi yang difokuskan dalam kebijakan.
- 2) Pengurangan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasional.
- 3) Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM sebagai dampak dari diversifikasi ekonomi dan inovasi pajak.

5. Roadmap dan Tahapan Implementasi

Rencana implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang dengan fokus pada:

- 1) Jangka Pendek (1-2 tahun): Digitalisasi layanan publik, pelatihan tenaga kerja, dan inisiatif awal diversifikasi ekonomi.
- 2) Jangka Menengah (3-5 tahun): Penguatan infrastruktur digital, peningkatan investasi sektor unggulan, dan perbaikan kualitas pendidikan vokasional.
- 3) Jangka Panjang (5+ tahun): Pengembangan pasar regional, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pasar.

B. Tahapan Proses Pemanfaatan

Dengan mengintegrasikan hasil IDSD ke dalam Rencana Implementasi (Jangka Pendek, Menengah dan Panjang), kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah tahapan proses pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk kebijakan pembangunan Kota Surakarta yang relevan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

1. Analisis Data IDSD

Tahap ini bertujuan untuk memahami hasil penilaian IDSD secara menyeluruh dan mendalam.

Kegiatan:

- 1) Pengumpulan data IDSD terbaru yang memuat penilaian pada semua dimensi, termasuk stabilitas ekonomi, pendidikan, akses keuangan, dan dimensi lainnya.
- 2) Identifikasi dan analisis dimensi-dimensi dengan skor rendah (di bawah 4.00) yang memerlukan perhatian khusus.

- 3) Membandingkan hasil penilaian IDSD Kota Surakarta dengan kota lain di wilayah Jawa Tengah untuk mengukur posisi daya saing relatif.

Output:

- 1) Laporan analisis IDSD yang memuat kekuatan dan kelemahan di berbagai dimensi.
- 2) Rekomendasi awal untuk prioritas kebijakan berbasis bukti IDSD.

2. Penyusunan Prioritas Kebijakan Berbasis Bukti

Menggunakan hasil analisis untuk menyusun prioritas kebijakan pembangunan.

Kegiatan:

- 1) Workshop dan diskusi bersama stakeholder (pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat) untuk menyepakati dimensi prioritas yang akan menjadi fokus kebijakan.
- 2) Pemilihan dimensi-dimensi yang paling kritis, seperti pendidikan, pasar, dan akses keuangan, untuk diletakkan pada RPJMD.
- 3) Menyelaraskan prioritas kebijakan dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD Kota Surakarta.

Output:

- 1) Daftar prioritas kebijakan berbasis dimensi IDSD yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD.

3. Perumusan Kebijakan dan Program Intervensi

Tahap ini bertujuan untuk merancang kebijakan dan program spesifik untuk memperbaiki skor pada dimensi tertentu.

Kegiatan:

- 1) Pengembangan kebijakan spesifik untuk memperkuat dimensi yang memiliki skor rendah, seperti stabilitas pasar atau pendidikan.
- 2) Pengalokasian anggaran yang mendukung program peningkatan daya saing di sektor yang lemah, misalnya revitalisasi pasar atau pengembangan pendidikan vokasional.
- 3) Penyusunan program-program intervensi yang terukur, seperti program digitalisasi pajak, peningkatan akses keuangan bagi UMKM, dan pendidikan berbasis vokasi.

Output:

- 1) Dokumen kebijakan dan program intervensi yang selaras dengan kebutuhan peningkatan daya saing daerah.

- 2) Rencana alokasi anggaran yang mendukung implementasi kebijakan.

4. Implementasi Program dan Kebijakan

Melaksanakan kebijakan dan program yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pemanfaatan IDSD.

Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan program-program yang telah dirumuskan, seperti revitalisasi pasar, peningkatan akses keuangan, penguatan pendidikan vokasional, dan inovasi pajak.
- 2) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dijalankan, dengan memperhatikan capaian dan hambatan yang dihadapi.

Output:

- 1) Pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan kebijakan berbasis IDSD.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan kebijakan.

5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Kebijakan

Menilai dampak dari kebijakan yang telah dijalankan terhadap daya saing daerah.

Kegiatan:

- 1) Pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan program serta perkembangan capaian skor IDSD.
- 2) Evaluasi tahunan untuk melihat apakah ada perbaikan skor pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus kebijakan.
- 3) Penyesuaian atau revisi kebijakan dan program jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Output:

- 1) Laporan evaluasi yang memuat capaian kebijakan berbasis data IDSD.
- 2) Rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan atau program di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi.

6. Pengembangan Berkelanjutan dan Integrasi dalam RPJMD Selanjutnya

Memastikan bahwa pemanfaatan IDSD menjadi proses yang terus menerus dalam setiap siklus perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan:

- 1) Menyusun roadmap jangka panjang untuk penguatan daya saing daerah yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.
- 2) Mengintegrasikan pembelajaran dari pemanfaatan IDSD ke dalam siklus RPJMD berikutnya.
- 3) Membangun kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan data IDSD untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Output:

- 1) RPJMD yang semakin responsif terhadap kebutuhan daya saing daerah.
- 2) Program penguatan daya saing yang terintegrasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2002). *Daya saing daerah: konsep dan pengukurannya di Indonesia: lampiran, Peta peringkat daya saing antar propinsi di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Angelidou, M. (2017). The Role of Smart City Characteristics in the Plans of Fifteen Cities. *Journal of Urban Technology*, 24(4), 3-28.
- Bahrami, H., & Evans, S. (2019). *Super-Flexibility for Knowledge Enterprises: A Toolkit for Dynamic Adaptation*. Springer.
- Barcellos-Paula, L., De la Vega, I., & Gil-Lafuente, A. M. (2021). The Quintuple Helix of innovation model and the SDGs: Latin-American countries' case and its forgotten effects. *Mathematics*, 9(4), 416.
- Catalán, S. G. (2021). Regional competitiveness in Latin America: a comparative study of the key elements for regional performance. *Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research*, (50), 125-146.
- Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public service innovation: a typology. *Public Management Review*, 22(11), 1674-1695.
- Chesbrough, H. (2020). *Open Innovation Results: Going Beyond the Hype and Getting Down to Business*. Oxford University Press.
- Chrobocińska, K. (2023). Competitiveness of Regions in Selected Countries of Central and Eastern Europe. *Central European Economic Journal*, 10(57), 391-402.
- Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. *Research Policy*, 47(3), 617-622.
- Geels, F. W. (2019). Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 39, 187-201.
- Gibson, J. W., & Naquin, S. S. (2019). *Managing Change in Organizations*. Business Expert Press.
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2019). *Digital Government and Public Management*. Springer.
- Judrupa, I. (2021). Regional competitiveness as an aspect promoting sustainability of Latvia. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 650-650.

- Kassen, M. (2022). Blockchain and e-government innovation: Automation of public information processes. *Information Systems*, 103, 101862.
- Korauš, A., Mazák, M., & Dobrovič, J. (2018). Quantitative analysis of the competitiveness of Benelux countries. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(4), 1069-1083.
- Nogueira, M. C., & Madaleno, M. (2023). Skill-Biased Technological Change and Gender Inequality across OECD Countries—A Simultaneous Approach. *Economies*, 11(4), 115.
- OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. OECD Publishing.
- OECD. (2019). *The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being*. OECD Publishing.
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Combination research approach: as a "middle ground" over the quantitative-qualitative dichotomy. *Moderate: Scientific Journal of Government Science*, 5(4), 530-548.
- Park, S. H. (2019). Korea's innovation policy and strategy: from imitation to ICT nation. *Technological Forecasting and Social Change*, 145, 175-183.
- Pisano, G. P. (2019). *Creative Construction: The DNA of Sustained Innovation*. PublicAffairs.
- Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.
- Walsh, P. P., Murphy, E., & Horan, D. (2020). The role of science, technology and innovation in the UN 2030 agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 154, 119957.

LAMPIRAN
INDIKATOR PEMETAAN DAYA SAING DAERAH

No.	Indikator	Kebutuhan Data
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	Regulasi yang Dijadikan Pedoman dalam Menentukan Besaran Biaya Administrasi Perijinan Industri
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?	Rata-Rata Durasi Waktu Pengurusan Administrasi Perijinan Usaha
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha dari Tahun Sebelumnya
4	Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	Persentase Industri yang Memanfaatkan Kebijakan Insentif Pajak
5	Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah
6	Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Besar
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	Sistern Manajemen Produksi Hasil Industri Kecil dan Menengah (SOP, ISO, dll)
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)	Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Besar (SOP, ISO, dll)
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	Jumlah Perusahaan Sosial yang Terdaftar oleh Pemerintah Daerah
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi/ Startup yang terdaftar di Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Balitbangda dan Swasta
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	Keberadaan dan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Lembaga dan Litbang dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Perjanjian Kerjasama Antara Industri/ Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
15	Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Litbang. Industri dan Pemerintah Daerah (Triple-Helix)

No.	Indikator	Kebutuhan Data
	inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Bidang Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?	Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun Terakhir
17	Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	Jumlah Artikel Ilmiah Jurnal yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional Selama 3 Tahun Terakhir
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir
19	Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Hak Cipta, Merek, Paten, dan Rahasia Dagang yang sudah Didaftarkan
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	Jumlah Paten yang Telah Dimanfaatkan Industri
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	Persentase Anggaran Penelitian dan Pengembangan terhadap Total APBD
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
23	Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	Peringkat Perguruan Tinggi di Daerah Secara Nasional (Diambil yang Tertinggi)
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang Memiliki Unit Penelitian dan Pengembangan
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Institusi dan Kelitbangan di Daerah yang Telah Melakukan Komersialisasi Inovasi
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	Kondisi Technopark dan Pusat Unggulan Iptek
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Smartphone
30	Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?	Proporsi Rumahtangga dengan Akses Internet
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	Jumlah Inovasi Teknologi di Daerah
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	Hasil Penetapan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional

No.	Indikator	Kebutuhan Data
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
35	Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi?	Indeks Demokrasi Indonesia di Tingkat Provinsi
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?	Persentase Penegakan Peraturan Daerah
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik Dibanding Total Panjang Jalan
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	Persentase Koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH)
44	Berapa rasio elektrifikasi?	Rasio Elektrifikasi
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	Pertumbuhan Ekonomi
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
47	Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan APBD terhadap PDRB-ADHB dari Tahun Sebelumnya
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	Nilai PDRB Per kapita ADHB
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Asing (PMA)
52	Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan UMKM terhadap UKM
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?	Persentase Angka Kemiskinan
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?	Nilai Tukar Petani
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?	Indeks Ketahanan Pangan
56	Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?	Persentase Balita Gizi Buruk
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?	Persentase Jumlah Balita Stunting
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	Angka Kematian Bayi/ Balita per 1000 Kelahiran Hidup
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Angka Kesakitan/ Morbiditas
60	Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?	Angka Harapan Hidup Tahun Terakhir
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk

No.	Indikator	Kebutuhan Data
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?	Rasio Dokter dan Medis Per 100.000 Penduduk
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	Angka Harapan Lama Sekolah
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	Rata-Rata Lama Sekolah
66	Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan Diploma I/ II/ III
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan D4/ S1
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Penduduk Berpendidikan S2
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan S3
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?	Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	Kenaikan Jumlah Program Latihan BLK 2 Tahun Terakhir
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Produk
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	Pola dan Karakteristik Kemitraan Antar Perusahaan (Kecil, Menengah dan Besar)
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	Persentase Kelembagaan Gapoktan yang Aktif
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku UMKM yang Aktif
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Rasio Rumah Sakit Umum per 100.000 Penduduk
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Kontribusi Retribusi Daerah dalam PAD
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	Regulasi Pemerintah Daerah yang Mendorong Efisiensi Pasar dan Menekan Laju Inflasi Daerah
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)?	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	Indeks Pembangunan Gender
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Total Angkatan Kerja
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	Persentase Pekerja Penuh Waktu dalam Seminggu

No.	Indikator	Kebutuhan Data
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tenaga Kerja Terampil
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	Jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	Persentase Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro Kepada Petani/ Nelayan
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan UKM
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas
96	Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?	Persentase Nilai Neraca Volume Perdagangan



BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta

Gedung Tawang Praja Lantai 1, Komplek Balaikota Surakarta
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta
(0271) 636426 | bridasurakarta@gmail.com